



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. K. H. Wachid Hasyim No. 5, Tlp. (031)3981794, Fax.(031)3984989, Gresik 61114
GRESIK

Gresik, 5 Agustus 2024

Nomor : 050 / 718 / 437.44 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2023

Kepada
Sdr. Inspektorat Kabupaten Gresik
di -
GRESIK

Menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Surat dari Inspektorat Nomor : X.700/1856/437.72/2024 tanggal 19 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan rencana tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan, sebagai berikut :

1. Perbaikan Mekanisme Data Kinerja.

- Menyusun SOP pengumpulan dan pengelolaan data kinerja, termasuk mekanisme koreksi bila terjadi kesalahan data.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIAKRI dengan memastikan seluruh data kinerja terunggah secara lengkap dan tepat waktu.
- Link : [SOP Sekretariat DPRD](#)

2. Benchmarking Kinerja

- Untuk indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik saat ini belum tersedia benchmark capaian nasional maupun internasional yang sejenis.
- Sebagai alternatif, Sekretariat DPRD akan menggunakan perbandingan antar daerah (cross daerah) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur.
- Selain itu, Sekretariat DPRD juga akan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan regulasi terkait sebagai acuan pembandingan.

3. Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja

- Menjadikan hasil evaluasi kinerja tahun berjalan sebagai bahan penyusunan Renja dan Rencana Aksi tahun berikutnya.
- Mengintegrasikan hasil laporan kinerja ke dalam rapat evaluasi internal bulanan sehingga seluruh pegawai memahami capaian dan kendala kinerja.
- Link : [LKjIP Tahun 2024](#)

4. Tindak Lanjut Evaluasi Internal

- Membuat Surat Tindak Lanjut atas hasil evaluasi internal oleh Inspektorat.
- Melaksanakan monitoring dan pelaporan secara berkala kepada Inspektorat terkait progres tindak lanjut.

5. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi

- Menetapkan standar administrasi kegiatan evaluasi dengan dokumen pendukung lengkap (undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan).
- Membuat arsip digital dan fisik untuk setiap kegiatan monitoring dan evaluasi agar mudah ditelusuri pada evaluasi berikutnya.
- Link : [Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2023](#)

Demikian surat jawaban ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam peningkatan kualitas implementasi SAKIP. Atas perhatian dan bimbingan Inspektorat Kabupaten Gresik, kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda
NIP 19680412 199203 1 011



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
JL.Wakhid Hasyim No : 05 Gresik**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Pola Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	4
1.4 Gambaran Umum Organisasi	5
1.5 Sistematika Penyusunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Indikator Kinerja Utama	16
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan	31
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Formulir Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2024	
Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja 2024	
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran 2024	
Lampiran 6. Cascading Sekretariat DPRD	
Lampiran 7. Laporan Hasil Implementasi SAKIP 2023	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	8
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	10
Gambar 1.2	Grafik Jumlah PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	11
Tabel 1.2	Proyeksi Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Berdasarkan Peta Jabatan	11
Tabel 1.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	12
Tabel 1.4	Jumlah Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Beserta Indikator Sasaran	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Program	21
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja	24
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	25
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	25
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	26
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja	29
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Tahun 2024	31
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	32
Tabel 3.7	Implementasi Sasaran Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	33

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024.

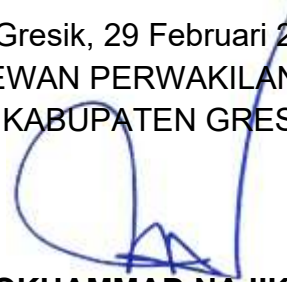
Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2021 – 2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam upaya mencapai tujuan dan sasarannya. Selama tahun 2024, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk tahun 2024 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024. Sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* kami.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Gresik, 29 Februari 2025
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selama Tahun 2024 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Melalui LKjIP, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, yang tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi selama tahun 2021 – 2026.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan sangat baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 124 % dari target sasaran yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini berarti kinerja Sekretariat DPRD di tahun 2024 dapat dicapai dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 110.103.971.901,00 dan telah direalisasi sebesar Rp. 84.074.570.764,36 atau 76,36 %.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada *input*, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis

kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) serta pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas bidang urusan Sekretariat DPRD.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Sekretariat DPRD sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dan mengatasi kelemahan (*Weakness*) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (*Opportunity*) dan dapat mengatasi ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi di bidang urusan wajib Sekretariat DPRD mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD

Sebagai media pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik maka ruang lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. **Tahap Pengumpulan Data**, mengumpulkan Data Kinerja sesuai bidang urusan wajib Sekretariat DPRD;
2. **Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja**, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan

dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), selanjutnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagai bentuk Komitmen Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Komitmen Kinerja sebagai dasar pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024;

3. **Tahap Pengukuran Capaian Kinerja**, perencanaan kinerja yang tertuang dalam Pernyataan Kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan selanjutnya membandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024.
4. **Akuntabilitas Kinerja**, dengan didukung data – data kinerja yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, selanjutnya dilakukan analisa yang merupakan isi pokok dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik serta hasil analisa ini dijadikan dasar dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja tahun mendatang.

Laporan Kinerja merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Gresik, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:

“Menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. “

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

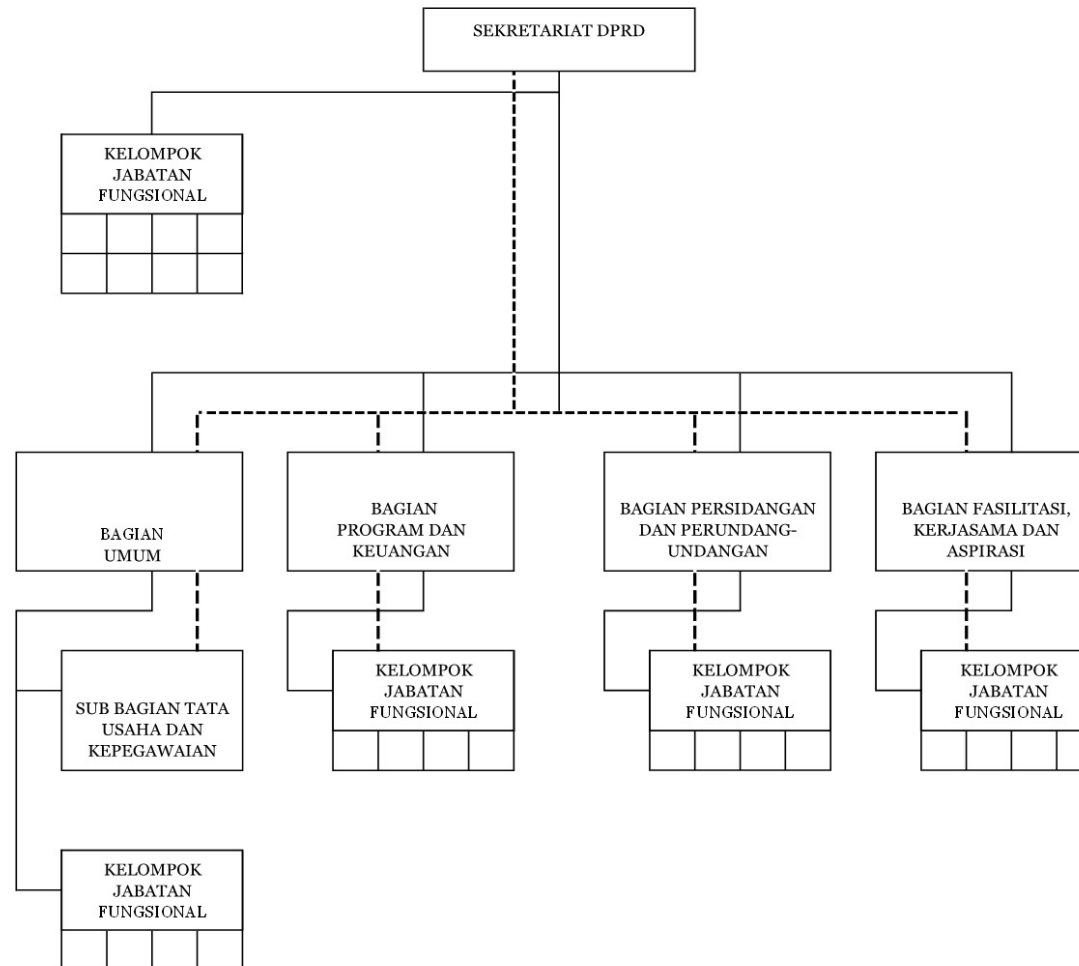
- a. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan Aspirasi; dan
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang mana secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur kelembagaan atau organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Program dan Keuangan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

- 5. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024



Sebagaimana gambaran struktur organisasi (*Organization Chart*) Satuan Unit Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik di atas, bahwa unsur pimpinan membawahi ;

1. **Bagian Umum** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD dan keanggotaan DPRD.
2. **Bagian Program dan Keuangan** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian dalam mendukung DPRD di bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
3. **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian pelayanan dukungan DPRD dalam pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan.
4. **Bagian Fasilitas, Kerjasama dan Aspirasi** yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi fungsi penganggaran dan pengawasan serta Kerjasama dan Aspirasi DPRD.
5. **Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli**, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

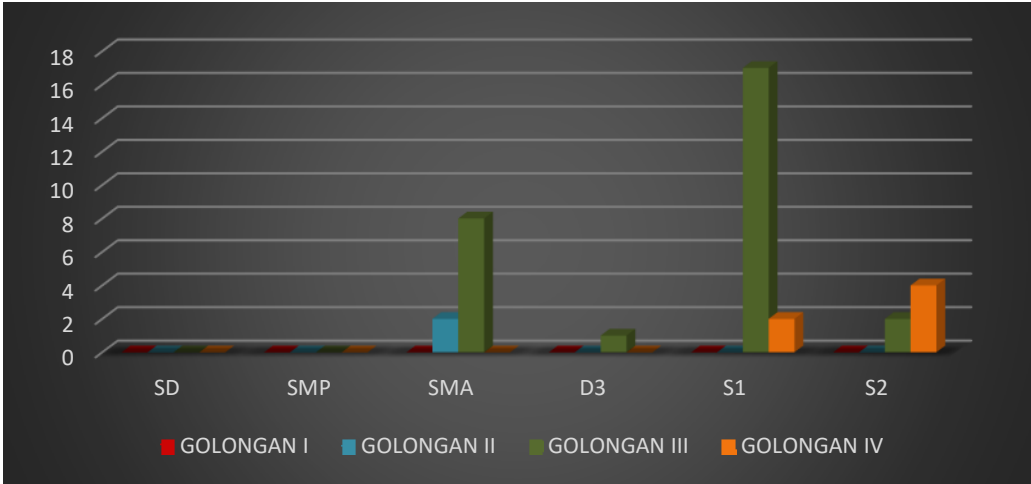
Secara operasional, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik

No.	Uraian	Pendidikan						Jml
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	8	-	-	-	8
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	-	1	12	-	13
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Penata (III/c)	-	-	-	-	1	-	1
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	4	2	6
4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	1	2	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	1	1	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	9	1	19	6	35

Dalam bentuk grafik, jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.2 Grafik Jumlah PNS Sekretariat DPRD Kab. Gresik Tahun 2024



Bila ditinjau dari jumlah pegawai yang ada memang kurang ideal tetapi dengan kemampuan yang ada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik senantiasa berupaya memaksimalkan peranan pegawai sesuai tugas dan fungsi yang ada. Hal ini dapat dilihat pada table peta jabatan berikut ini :

Tabel 1.2
Proyeksi Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD
Kabupaten Gresik Berdasarkan Peta Jabatan Per 31 Desember 2024

No	Nama Jabatan	Kelas	Pemangku	Kebutuhan	Lebih/ Kurang
1	SEKRETARIS DPRD	14	1	1	0
2	KEPALA BAGIAN UMUM	11	1	1	0
3	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	8	1	1	0
4	Pranata Kearsipan	6	2	2	0
5	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
6	Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
7	Pengadministrasi Persuratan	5	0	1	-1
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 1	9	1	1	0
9	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	1	1	0
10	Pranata Barang dan Jasa	6	0	1	-1
11	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	1	4	-3
12	Pengelola Kendaraan	6	1	1	0
13	Pengemudi	3	2	2	0
14	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	11	1	1	0
15	PERENCANA AHLI MUDA	9	1	1	0
16	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	-1
17	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	0	1	-1
18	Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
19	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1	1	0
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 5	9	0	1	-1

No	Nama Jabatan	Kelas	Pemangku	Kebutuhan	Lebih/ Kurang
21	Bendahara	7	1	1	0
22	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	6	1	2	-1
23	Verifikator Keuangan	6	2	1	-1
24	Pengelola Gaji	6	1	1	0
25	Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1
26	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	11	1	1	0
27	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	9	1	1	0
28	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7	1	1	0
29	Notulis Rapat	6	1	1	0
30	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	5	1	0	-1
31	Pengadministrasi Umum	5	1	0	-1
32	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 2	8	1	1	0
33	Notulis Rapat	6	1	2	-1
34	Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2
35	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9	1	1	0
36	Analisis Sistem Informasi	7	1	1	0
37	Petugas Protokol	6	1	1	0
38	Tenaga Peliputan	6	1	1	0
39	Pengelola Dokumentasi	6	0	1	-1
40	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
41	KABAG FASILITASI, KERJASAMA, DAN ASPIRASI	11	1	1	0
42	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 3	8	1	1	0
43	Notulis Rapat	6	2	4	-2
44	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
45	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 4	8	1	1	0
46	Notulis Rapat	6	2	4	-2
47	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

No.	Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	Jumlah
1.	Ruang Kerja	28
2.	Meja/Kursi Kerja	189
3.	Komputer	82
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	19
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	10

Tabel 1.4

Jumlah Aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Per 31 Desember 2024

No	Kode Kelompok Barang	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1	10111	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	1	2.362.500.000,00	Baik
2	20203	ALAT-ALAT BANTU	5	526.570.000,00	Baik
3	20301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	29	5.012.971.535,00	Baik
4	20601	ALAT KANTOR	35	901.118.500,00	Baik
5	20602	ALAT RUMAH TANGGA	996	3.896.430.688,32	Baik
6	20603	KOMPUTER	248	1.860.879.976,30	Baik
7	20604	MEJA & KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	43	139.250.135,33	Baik
8	20701	ALAT STUDIO	300	2.962.062.960,10	Baik
9	20702	ALAT KOMUNIKASI	20	147.893.000,00	Baik
10	31101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	9.125.164.766,00	Baik
11	31102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	-	-
12	41505	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	199.588.900,00	Baik

No	Kode Kelompok Barang	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
13	41509	INSTALASI PENGAMAN	1	10.750.000,00	Baik
14	51701	BUKU	184	86.093.775,00	Baik
15	51801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	1	10.456.600,00	Baik
16	802	ASET TAK TERWUJUD	11	140.740.000,00	Baik
TOTAL			1.877	27.382.470.836,05	

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Formulir Rencana Strategis (RS) 2021-2026
- Lampiran 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2024
- Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja 2024
- Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran 2024
- Lampiran 6. Cascading Sekretariat DPRD
- Lampiran 7. Laporan Hasil Implementasi SAKIP 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Tujuan organisasi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

a. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Dengan berlandaskan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan didalam RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik untuk Tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan strategis yaitu ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas”***.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Beserta Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel Dengan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor: 067/694/HK/437.12/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%

Untuk dapat mewujudkan Indikator Kinerja Utama maka diperlukan formulasi penghitungan yaitu jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD dikali 100%. Jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi yang dimaksud adalah jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yang telah dilaksanakan di tahun 2024 sedangkan jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD adalah jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang telah ditetapkan didalam dokumen Rencana Kerja DPRD tahun 2024.

2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Gresik dan Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Jabatan : Bupati Gresik

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

ttd

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 15 Januari 2024

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ttd

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 44.741.654.316,00	APBD
2	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 48.069.779.862,00	APBD
JUMLAH			Rp. 92.811.434.178,00	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

ttd
H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 15 Januari 2024
PIHAK KESATU
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ttd
Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP: 196804121992031011

Untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja diatas maka Sekretaris DPRD Kabupten Gresik menetapkan Indikator Kinerja Program guna pencapaian sasaran organisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Tercapainya Nilai SAKIP OPD dengan predikat memuaskan	Nilai Sakip dari Inspektorat Kabupaten	(A)	46.672.853.616,00
			Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Jumlah capaian program minimal 76% dibagi jumlah program dikali 100%	100%	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan regulasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi DPRD dikali 100%	100%	36.490.402.484,00
			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD dikali 100%	100%	

			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Berdasarkan Renja dikali 100%	100%
			Tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat dengan hasil Sangat Baik	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat	90 (Sangat Baik)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada tahun 2024 telah berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2024, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	124	124

3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat ataspelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bagian maupun Sub Bagian sebagai pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sub pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2024 yang merupakan tahun kedua Renstra 2021 – 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.

Sasaran strategis “Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.” dengan 6 indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	124%	124%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	96%	124%	28%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Per Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan

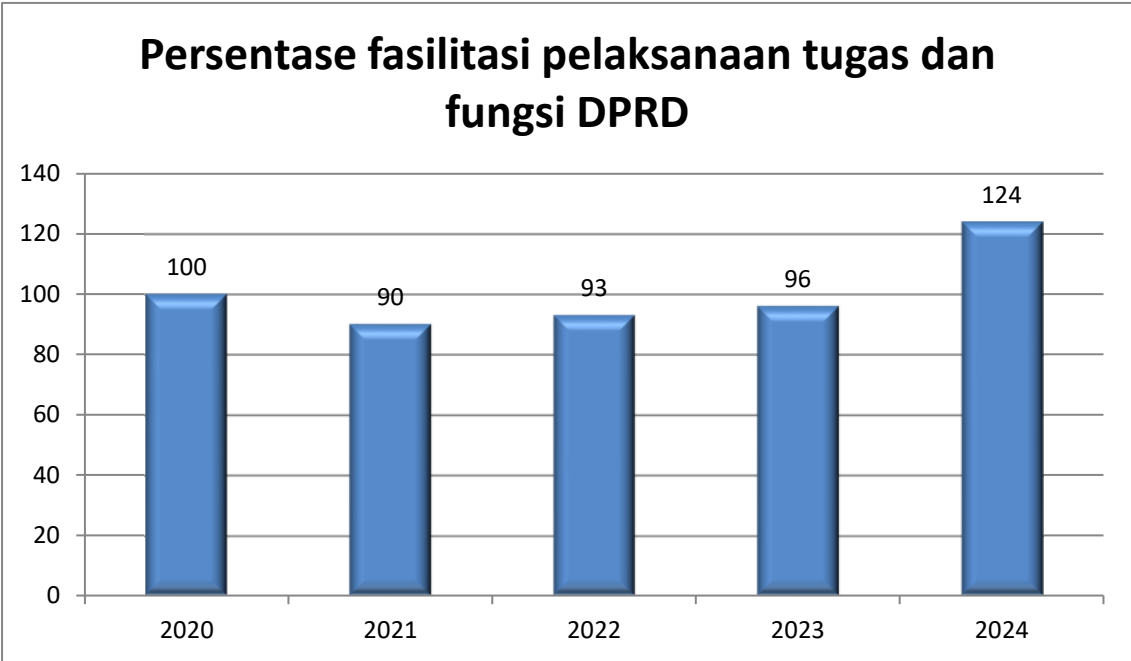
No.	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Perbandingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	131%	109%	22%
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	0%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	283%	100%	183%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133%	100%	33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	86%	-4%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	0%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	0%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	111%	11%
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
9	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	129%	106%	6%

10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91%	91%	-9%
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175%	175%	75%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200%	100%	100%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	-100%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	109%	-50%
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	0%
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140%	140%	40%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	281%	423%	181%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75%	150%	-25%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167%	267%	67%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73%	100%	-27%
21	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	200%	100%	100%
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481%	95%	350%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375%	67%	275%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265%	18%	169%
25	Pemeliharaan Mebel	93%	100%	-7%
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132%	100%	32%
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	0%
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400%	160%	300%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			

29	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%	0%
30	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	100%	0%
31	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	32%	50%	-10%
	Layanan Administrasi DPRD			
32	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	80%	60%	20%
33	Fasilitasi Fraksi DPRD	0%	0%	-100%
34	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20%	90%	-10%
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	96%	124%	3%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
35	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100%	100%	0%
36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	113%	100%	13%
37	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	100%	0%	89%
38	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	75%	100%	-25%
39	Penyusunan Tata Tertib DPRD	100%	100%	100%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
40	Pembahasan KUA dan PPAS	175%	100%	75%
41	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150%	100%	50%
42	Pembahasan APBD	100%	100%	0%
43	Pembahasan APBD Perubahan	200%	100%	100%
44	Pembahasan Laporan Semester	100%	100%	0%
45	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	175%	100%	75%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
46	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	317%	217%
47	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100%	383%	283%
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	83%	375%	64%
49	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100%	392%	292%

50	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	100%	100%	0%
51	Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	100%	0%
52	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100%	100%	0%
	Peningkatan Kapasitas DPRD			
53	Orientasi DPRD	0	100%	100%
54	Pendalaman Tugas DPRD	100%	100%	0%
55	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	104%	67%	37%
56	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100%	100%	0%
57	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100%	108%	8%
58	Penyusunan Program Kerja DPRD	100%	99%	1%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
59	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100%	50%	50%
60	Pelaksanaan Reses	100%	67%	33%
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
61	Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	50%	50%
	Fasilitasi Tugas DPRD			
62	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	47%	55%	8%
63	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	100%	100%	0%
64	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	58%	54%	-4%
65	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	175%	183%	8%

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja



1. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dengan target 100% dan realisasi 124% yang berarti capaiannya adalah 124%. Nilai ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi sebanyak 993 kali dibagi jumlah pelaksanaan tugas DPRD berdasarkan Rencana Kerja DPRD sebanyak 1.070 dikali 100%.

$$\frac{653}{810} \times 100\% = 124\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat DPRD adalah :

- 1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup;
- 2. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD. DPRD. dan Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik untuk saling mendukung terlaksananya program dan kegiatan.

Sedangkan hambatan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah :

- 1. Terjadinya perubahan regulasi yang mendasar di tingkat pusat
- 2. Kurang optimalnya perencanaan anggaran
- 3. Kurangnya pemahaman staf terhadap tugas dan fungsi
- 4. Kurangnya *political will* dalam pelaksanaan tugas
- 5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas

Strategi / upaya pemecahan permasalahan pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah :

- 1. Menyesuaikan regulasi di tingkat daerah agar selaras dengan pusat
- 2. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD untuk memperhatikan / konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah dijadwalkan.
- 3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil tersebut secara maksimal. dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir. sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk sistem informasi dan manajemen yang baik.
- 4. Pemahaman dan komitmen yang baik tentang Struktur Organisasi yang ada dan mengoptimalkan kinerja sesuai tugas dan fungsi. namun apabila ditengah jalan masih terdapat fungsi-fungsi yang belum ada di Struktur Organisasi. maka diupayakan penambahannya ke pengambil kebijakan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja. tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran. yang ditampilkan dalam prosentase realisasi. Pada Tahun 2024. anggaran belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 89.838.371.811.00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 80.824.043.736.00 atau 89.97%. sehingga terdapat silpa Rp. 9.014.328.075.00.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Tahun 2024

NO	URAIAN BELANJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
1	Sekretariat DPRD	110.103.971.901,00	84.074.570.764,36	76,35
TOTAL		110.103.971.901,00	84.074.570.764,36	76,35

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	124%	124%	110.103.971.901.00	84.074.570.764.36	76,35	23,65%
	Jumlah				96%	46.946.288.479	38.716.415.442	76,35%	23,65%

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam pencapaian kinerja sasaran organisasi sebesar 2.91%.

Tabel 3.7
Implementasi Sasaran Dalam Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya.	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
						5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
						2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						5. Penyediaan Barang Cetak dan

						Penggandaan
						6. Fasilitas Kunjungan Tamu
						7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel
						2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
						3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

					Urusan Pemerintahan Daerah	Jabatan
						2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						3. Pemeliharaan Mebel
						4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
						2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

						3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
					9. Layanan Administrasi DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
						2. Fasilitas Fraksi DPRD
						3. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
				2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
						2. Pembahasan Rancangan Perda
						3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
						4. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
						5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
					2. Peningkatan	1. Pendalaman Tugas DPRD

					Kapasitas DPRD	2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
						3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
						4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
						5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
						6. Penyusunan Program Kerja DPRD
					3. Fasilitasi Tugas DPRD	1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
						2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
						3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
						4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
					4. Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. Pembahasan KUA dan PPAS
						2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

						3. Pembahasan APBD
						4. Pembahasan APBD Perubahan
						5. Pembahasan Laporan Semester
						6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
					5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum
						2. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur
						3. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat
						4. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian
						5. Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam
						6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil

						Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
						7. Pengawasan Penggunaan Anggaran
						8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
					6. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
						2. Pelaksanaan Reses
						3. Pengawasan Kode Etik DPRD

Dari tabel diatas dapat dilihat implementasi sasaran dan indikator sasaran dalam program. kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bagian dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024 terdiri 1 (satu) sasaran. Secara umum, pencapaian 1 (satu) sasaran dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan kinerja sasaran rendah yaitu :

1. Jadwal Kegiatan sering mengalami perubahan menyesuaikan hasil Rapat Badan Musyawarah, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal;
2. Adanya kegiatan yang bersifat insidentiil dan tidak direncanakan sebelumnya, sehingga mengganggu program – program yang lain.

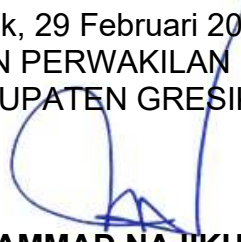
Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran yang sudah baik dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD untuk memperhatikan / konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah dijadwalkan;
2. Melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil tersebut secara maksimal, dan untuk perencanaan di tahun berikutnya bisa diakomodir, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terbentuk Sistem Informasi dan Manajemen yang baik.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 2021 – 2026 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja utama tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gresik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Gresik.

Gresik, 29 Februari 2025
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik
Dari : Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik
Tanggal : 11 Januari 2024
Nomor : 900/04/437.44/2024
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi terkait Pelaporan Monev Triwulan IV Tahun 2023

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2024
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik
Acara : Rapat Koordinasi terkait Pelaporan Monev Triwulan IV Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda
NIP 19680412 199203 1 011

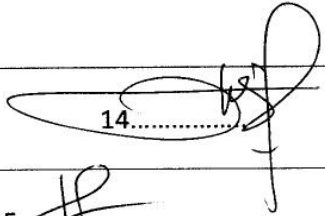
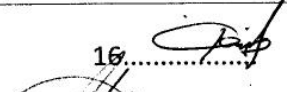
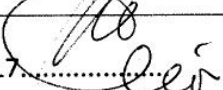
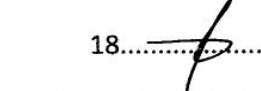
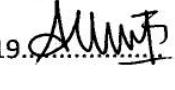
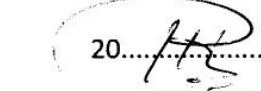
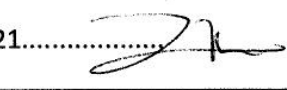
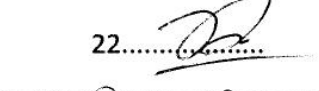
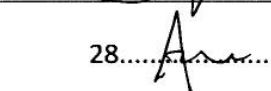
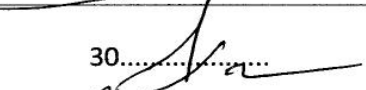
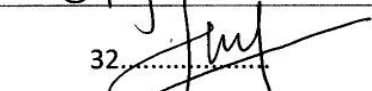
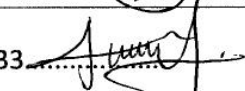


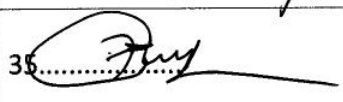
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. K. H. Wachid Hasyim No. 5, Tlp. (031)3981794, Fax.(031)3984989, Gresik 61114
G R E S I K

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik
Acara : Rapat Koordinasi terkait Pelaporan Monev Triwulan IV Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<i>Mulyana</i>	<i>Setda DPRD</i>	1. <i>[Signature]</i>
2.	<i>Budi Raharjo</i>	<i>Kabag Fasilitasi</i>	2. <i>[Signature]</i>
3.	<i>Marfu'ah Yunisati</i>	<i>Kabag Umum</i>	3. <i>[Signature]</i>
4.	<i>LIVERA</i>	<i>Persidangan</i>	4. <i>[Signature]</i>
5.	<i>ARIEF BUDI</i>	<i>AKAM</i>	5. <i>[Signature]</i>
6.	<i>Anang Ys.</i>	<i>Analisis</i>	6. <i>[Signature]</i>
7.	<i>Desr K. Sandr</i>	<i>Kasubag TU</i>	7. <i>[Signature]</i>
8.	<i>Agus Pipah</i>	<i>Ptaraht Keasippan</i>	8. <i>[Signature]</i>
9.	<i>Solichah W</i>	<i>Potancang Potat PerUVan Ahli Mukt</i>	9. <i>[Signature]</i>
10.	<i>ABDUL RHO KID</i>	<i>NOTULIS RAPAT</i>	10. <i>[Signature]</i>
11.	<i>MATAN MULYANA</i>	<i>NOTULIS RAPAT</i>	11. <i>[Signature]</i>
12.	<i>Rizki K</i>	<i>Perencana Ahli Mukt</i>	12. <i>[Signature]</i>
13.	<i>Dion Prayue</i>	<i>Red. Perencanaan Program</i>	13. <i>[Signature]</i>

14.	Ayu Prania	Amis Sis Inp	14..... 
15.	Norhanik	Am umum	15..... 
16.	Dedi Giris	STAF Fasilitasi	16..... 
17.	Murklewis	Staf Um	17..... 
18.	Aswandi Ibad	Analis Sistem Informasi	18..... 
19.	Ferdyan Susetyo	Staf Keuangan	19..... 
20.	Hariyanto	Pelaksana Sarana Prasarana	20..... 
21.	Zulkifli	"	21..... 
22.	MARI	STAF	22..... 
23.	KUSUMA AGUNG TI	"	23..... 
24.	Chodijah R.	Bendah	24..... 
25.	Leni	Humas	25..... 
26.	Ika	Kisday	26..... 
27.	Emilya Frawah	staf	27..... 
28.	Aris Swardo		28..... 
29.	Bagus Cahyono		29..... 
30.	Solukhan		30..... 
31.	Muruk Fauziah	Staf umum	31..... 
32.	Noviyanto.		32..... 
33.	Muhammad Lili		33..... 

34.	M. Syahroni	serif umu	34..... 
35.	Budi Purwanto		35..... 
36.			36.....
37.			37.....
38.			38.....
39.			39.....
40.			40.....
41.			41.....
42.			42.....
43.			43.....
44.			44.....
45.			45.....
46.			46.....
47.			47.....
48.			48.....
49.			49.....
50.			50.....

RAPAT KOORDINASI TERKAIT PELAPORAN MONEV TRIWULAN IV TAHUN 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik
Acara : Rapat Koordinasi terkait Pelaporan Monev Triwulan IV Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik

I. Pendahuluan

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 secara lebih terarah, efisien, dan terukur, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pada hari Kamis, 11 Januari 2024, bertempat di Ruang Rapat Komisi I Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik. Rapat ini merupakan agenda rutin awal tahun yang bertujuan untuk menyatukan persepsi, menyusun strategi pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat sinergi antar bagian, subbagian, dan seluruh unsur pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD.

II. Peserta Rapat

Rapat dihadiri oleh:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik
2. Kepala Bagian
3. Kasubbag dan Sub Koor
4. Seluruh staf ASN dan Non ASN

III. Tujuan Rapat

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk:

- Mengevaluasi capaian dan kendala pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sebagai bahan perbaikan.
- Menyampaikan rencana kegiatan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan DPRD.
- Mengoptimalkan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun.
- Memastikan pelaksanaan anggaran dan program kerja tahun 2024 berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- Memperkuat koordinasi lintas bagian dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

IV. Pokok-Pokok Pembahasan

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023
 - Disampaikan secara garis besar terkait pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, termasuk kendala administratif, teknis, maupun keterlambatan dalam realisasi anggaran.
 - Beberapa bagian menyampaikan perlunya perbaikan dalam mekanisme pelaporan, percepatan proses pengadaan, dan efisiensi komunikasi antarbagian.
2. Pemaparan Rencana Kegiatan Tahun 2024
 - Masing-masing bagian menyampaikan gambaran umum rencana kegiatan beserta indikator kinerja yang ingin dicapai.
 - Ditekankan pentingnya menyusun program yang selaras dengan arah kebijakan DPRD dan prioritas pelayanan publik.
3. Strategi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan
 - Percepatan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan persiapan teknis kegiatan fisik dan non-fisik sejak triwulan pertama.
 - Penetapan timeline pelaksanaan kegiatan serta rencana monitoring dan evaluasi rutin.
4. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi Internal
 - Sekretaris DPRD menekankan pentingnya koordinasi lintas bagian dan pemahaman bersama terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
 - Didorong adanya komunikasi terbuka antarbagian dalam mengantisipasi hambatan pelaksanaan kegiatan.
5. Arahan dari Sekretaris DPRD
 - Sekretaris DPRD memberikan arahan agar seluruh ASN dan Non-ASN di lingkungan Sekretariat memiliki semangat pelayanan, tanggung jawab, dan disiplin tinggi dalam bekerja.
 - Ditekankan pula pentingnya peningkatan kualitas dokumentasi kegiatan, transparansi keuangan, dan pelaporan akuntabel sebagai bentuk dukungan terhadap pengawasan DPRD maupun BPK.

V. Hasil dan Keputusan Rapat

Berdasarkan hasil diskusi dan arahan pimpinan, ditetapkan beberapa poin keputusan sebagai berikut:

1. Seluruh bagian dan subbagian diwajibkan untuk menyelesaikan penyusunan DPA dan kelengkapan administrasi lainnya maksimal pada minggu ke-2 bulan Januari 2024.
2. Setiap bagian harus menyusun timeline kegiatan secara rinci hingga triwulan IV dan menyerahkannya kepada Sekretariat paling lambat minggu ke-3 bulan Januari 2024.
3. Evaluasi internal pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara bulanan, dengan pelaporan progres yang jelas.

4. Penunjukan penanggung jawab kegiatan (PIC) dilakukan segera untuk setiap program strategis agar koordinasi lebih efektif.
5. ASN dan Non-ASN diminta menjaga profesionalisme, kedisiplinan, serta turut berperan aktif dalam menyelesaikan kegiatan lembaga.

VI. Penutup

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi landasan awal yang kuat untuk menyongsong pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Seluruh peserta rapat menyampaikan komitmen untuk bekerja lebih optimal, serta menjalin komunikasi yang efektif demi mendukung kinerja kelembagaan DPRD secara menyeluruh.

Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB oleh Sekretaris DPRD, dengan pesan bahwa seluruh unsur pelaksana harus siap bekerja dengan semangat dan tanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai integritas dalam setiap kegiatan.

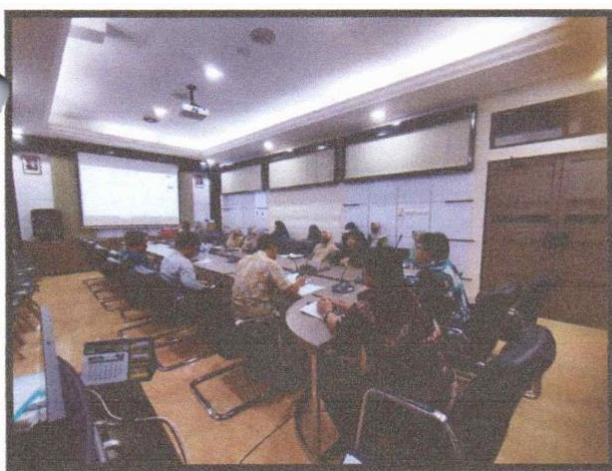
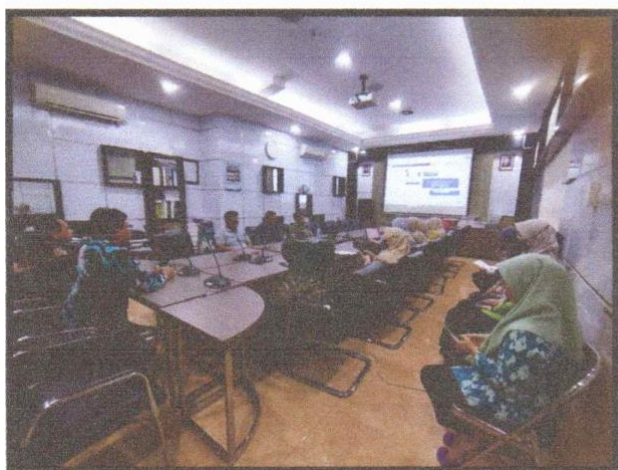
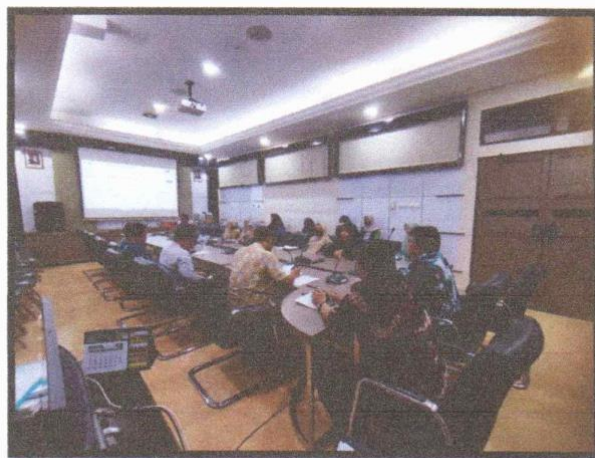
Gresik, 12 Januari 2024

Yang membuat laporan,



SETIJO HERMAWAN, S.H.
NIP. 19711105 199903 1 006

**DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TERKAIT PELAPORAN
MONEV TRIWULAN IV TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK
(11 JANUARI 2024)**



PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten/Kota : Gresik
Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD
Periode Renja PD : 2023
Periode RKA PD : 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Satuan
						Dana	Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak				
						RKA	Renja	RKA	Renja	RKA						
1					2	6	7		8		9	10	11	12	13	14
4	02	1			SEKRETARIAT DPRD	79.625.348.653	100	100	77.631.674.100	Masih Belum Menyusun RKA						%
4	02	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.276.431.037			44.836.881.816							
Indikator Program							A	A								Nilai
4	02	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	336.664.500	100	Masih Belum Menyusun RKA	354.470.000	Masih Belum Menyusun RKA						Dokumen
4	02	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	169.276.500	8		165.829.000		√					Dokumen
4	02	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.212.000	6		120.055.000		√					Laporan
4	02	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.176.000	3		68.586.000		√					Laporan
4	02	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.058.021.048	37		6.444.877.000							Dokumen
4	02	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.901.351.048	37		6.294.167.000		√					Orang/bulan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Satuan
						Dana	Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak				
						RKA	Renja	RKA	Renja	RKA						
1					2	6	7		8		9	10	11	12	13	14
4	02	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	117.880.000	1.138		94.820.000		√					Dokumen
4	02	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.640.000	5		17.250.000		√					Laporan
4	02	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	9		24.240.000		√					Laporan
4	02	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.150.000	1		14.400.000		√					Dokumen
Indikator Program																%
4	02	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	271.962.045,00	47		275.322.050							Dokumen
4	02	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.420.000	17		12.780.000		√					Dokumen
4	02	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	217.232.049	22		217.232.050		√					Orang
4	02	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.309.996	8		45.310.000		√					Orang
4	02	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	790.587.483,00	241		730.547.700							Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Satuan
						Dana	Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak				
						RKA	Renja	RKA	Renja	RKA						
1					2	6	7		8		9	10	11	12	13	14
						0	0									Tingkat
4	02	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.390.000	1		30.431.000		√					Paket
4	02	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.726.500	7		153.926.500		√					Paket
4	02	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	126.002.000	2		65.181.200		√					Paket
4	02	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.838.984	74		85.055.000		√					Paket
4	02	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	130.120.000	5		109.444.000		√					Paket
4	02	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.350.000	132		130.350.000		√					Laporan
4	02	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.159.999	20		156.160.000		√					Laporan
4	02	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0		156.160.000		√					Dokumen
4	02	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.122.600,00	3		0							Unit
4	02	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.122.600	3		-		√					Unit
4	02	1	2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.519.006.000	180		2.520.320.000							Laporan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Satuan
						Dana	Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak				
						RKA	Renja	RKA	Renja	RKA						
1					2	6	7		8		9	10	11	12	13	14
4	02	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.196.000	90		28.160.000		√					Laporan
4	02	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.560.000	12		325.560.000		√					Laporan
4	02	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.177.250.000	78		2.166.600.000		√					Laporan
4	02	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.288.673.600	294		912.988.066							Unit
4	02	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	341.440.000	4		241.440.000		√					Unit
4	02	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.653.000	26		294.390.000		√					Unit
4	02	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	18.750.000	156		25.000.000		√					Unit
4	02	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.164.400	101		134.021.250		√					Unit
4	02	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	208.504.000	2		50.000.000		√					Unit
4	02	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.162.200	5		168.136.816		√					Unit
4	02	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	32.762.089.781	50		33.433.253.000							Orang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Satuan
						Dana	Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak				
						RKA	Renja	RKA	Renja	RKA						
1					2	6	7		8		9	10	11	12	13	14
4	02	1	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	32.360.218.255	50		33.032.253.000		√					Orang/Bulan
4	02	1	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	326.871.526	5		326.000.000		√					Paket
4	02	1	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000	50		75.000.000		√					Orang
4	02	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	114.303.980	30		165.104.000							Laporan
4	02	1	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	37.977.991	10		38.608.000		√					Dokumen
4	02	1	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	23.025.989	10		26.296.000		√					Laporan
4	02	1	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	53.300.000	10		100.200.000		√					Laporan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Satuan
						Dana	Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak				
						RKA	Renja	RKA	Renja	RKA						
1					2	6	7		8		9	10	11	12	13	14
4	02	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	36.348.917.616			32.794.792.284							
Indikator Program																%
4	02	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.840.390.300	19		6.610.108.500							Dokumen
4	02	2	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	247.063.400	2		336.522.900		√					Dokumen
4	02	2	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	1.914.675.900	8		2.793.998.300		√					Dokumen
4	02	2	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	692.105.600	1		236.191.000		√					Dokumen
4	02	2	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2.704.936.400	8		3.243.396.300		√					Dokumen
4	02	2	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	281.609.000	1		3.243.396.300		√					Dokumen
Indikator Program																%
4	02	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.757.401.500	26		1.423.350.400							Dokumen
4	02	2	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	281.486.900	4		301.911.000		√					Dokumen
4	02	2	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	272.941.300	4		291.931.000		√					Dokumen
4	02	2	2.02	03	Pembahasan APBD	306.186.000	6		131.450.000		√					Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Satuan
						Dana	Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak				
						RKA	Renja	RKA	Renja	RKA						
1					2	6	7		8		9	10	11	12	13	14
4	02	2	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	583.086.800	4		366.289.000		√					Dokumen
4	02	2	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	33.940.100	4		41.800.000		√					Dokumen
4	02	2	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	279.760.400	4		289.969.400		√					Dokumen
Indikator Program																%
4	02	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	719.888.216	59		951.542.900							Laporan
4	02	2	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahanan Bidang Pemerintahanan dan Hukum	89.113.600	12		109.747.600		√					Laporan
4	02	2	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	89.113.600	12		109.747.600		√					Laporan
4	02	2	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	89.813.216	12		109.747.600		√					Laporan
4	02	2	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	89.113.600	12		109.747.600		√					Laporan
4	02	2	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0	1		103.003.500		√					Laporan
4	02	2	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	52.545.200	6		83.600.000		√					Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Satuan
						Dana	Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak				
						RKA	Renja	RKA	Renja	RKA						
1					2	6	7		8		9	10	11	12	13	14
4	02	2	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	310.189.000	4		325.949.000		√					Dokumen
4	02	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.733.972.600	7		1.755.077.500							Dokumen
4	02	2	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	506.451.600	4		571.940.000		√					Dokumen
4	02	2	2.05	03	Pelaksanaan Reses	1.227.521.000	3		1.183.137.500		√					Dokumen
4	02	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	36.870.900	2		25.000.000							kali
4	02	2	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	36.870.900	2		25.000.000		√					Laporan
4	02	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	0	0		31.356.000							Dokumen
4	02	2	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0	0		31.356.000		√					Dokumen
Indikator Program																Nilai
4	02	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	18.044.150.500	307		14.262.809.300							Dokumen
4	02	2	2.04	01	Orientasi DPRD	0	0		1.935.287.000		√					Dokumen
4	02	2	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	2.617.109.100	6		1.935.287.000		√					Dokumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	Satuan
						Dana	Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak				
						RKA	Renja	RKA	Renja	RKA						
1					2	6	7		8		9	10	11	12	13	14
4	02	2	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	14.750.553.400	269		11.697.954.000		√					Dokumen
4	02	2	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	255.140.000	7		255.140.000		√					Orang
4	02	2	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	95.847.000	24		118.734.900		√					Dokumen
4	02	2	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	325.501.000	1		255.693.400		√					Dokumen
4	02	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	8.216.243.600	182		7.735.547.684							Dokumen
4	02	2	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.761.634.600	116		6.065.242.684		√					Dokumen
4	02	2	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	339.478.000	6		220.577.200		√					Laporan
4	02	2	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	26.250.000	24		51.210.000		√					Dokumen
4	02	2	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.088.881.000	36		1.398.517.800		√					Dokumen
4	02	2	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	0	0		1.398.517.800		√					Dokumen
Jumlah						79.625.348.653			77.631.674.100							

Gresik, 3 Januari 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah Kabupaten/kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrembang Kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Dearah Kabupaten/Kota sesuai surat edaran Bupati/Wali Kota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disyahkan	√			

Gresik, 3 Januari 2024
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Gresik
Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Sekretariat DPRD : 24,66

Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Tingkat Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2023	
										I		II		III		IV									
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		14= 6 +12		15=	
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	SEKRETARIAT DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	577.277.679.097	50%	143.918.948.449	100%	79.625.348.653	23%	16.857.742.741,00	23%	19.633.622.015,83	23%	19.760.556.196	-	24.572.122.783	69%	80.824.043.736	69%	101,51%	119%	228.163.097.567	119%	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			314.248.441.553		34.281.259.273		43.276.431.037		9.531.866.462,00		10.877.653.969,83		10.316.365.514		11.381.742.348		42.107.628.294		97,30%		79.920.367.259		
Indikator Program			Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	A	43.167.783.131	A	15.528.927.917	A	Nilai	5.394.685.548	A	829.444.389,00	A	2.017.125.559,83	A	1.157.851.954	A	1.312.929.575	A	5.317.351.478	A	98,57%	A	21.435.262.436	A
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	107	3.706.497.203	73	1.706.643.474	17	Dokumen	336.664.500	10	106.066.800,00	5	67.066.500,00	6	65.243.284	8	243.663.303	13	482.039.887	78%	143,18%	86	2.188.683.361	81%
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	39	1.588.335.876	32	950.129.174	8	Dokumen	169.276.500	1	82.960.800,00	-	17.279.000,00	1	43.798.659	2	156.658.320	5	300.696.779	56%	177,64%	37	1.250.825.953	94%
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	1.178.220.786	21	445.826.300	6	Laporan	106.212.000	6	23.106.000,00	5	5.370.000,00	5	21.444.625	5	81.120.983	5	131.041.608	80%	123,38%	26	576.867.908	64%
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	939.940.542	20	310.688.000	3	Laporan	61.176.000	3	-	-	44.417.500,00	0	-	1	5.884.000,00	4	50.301.500	133%	82,22%	24	360.989.500	86%
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	4.649	39.461.285.928	336	13.822.284.443	1.153	Dokumen	5.058.021.048	309	723.377.589,00	309	1.950.059.059,83	337	1.092.608.670	269	1.069.266.272	1.225	4.835.311.591	106%	95,60%	36	19.246.579.075	0%
4		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	37.603.027.474	108	13.822.284.443	36	Orang/bulan	4.901.351.048	36	705.046.989,00	36	1.896.060.559,83	36	1.059.490.670	36	1.037.753.272	36	4.698.351.491	100%	95,86%	36	18.520.635.934	100%
5		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.552	1.299.427.392	190	428.203.950	1.138	Dokumen	117.880.000	300	16.050.600,00	300	45.538.500,00	300	25.018.000	240	23.563.000	1.141	110.170.100	100%	93,46%	1331	538.374.050	29%
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20	186.589.938	15	98.815.000	5	Laporan	14.640.000	-	1.080.000,00	-	8.460.000,00	6	-	0	2.250.000	6	11.790.000	120%	80,53%	21	110.605.000	105%
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	261.526.125	20	47.134.091	9	Laporan	15.000.000	9	1.200.000,00	9	-	29	1.800.000	29	5.700.000	9	8.700.000	100%	58,00%	9	55.834.091	25%
8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	110.715.000	3	14.830.000	1	Dokumen	9.150.000	-	-	-	-	2	6.300.000	0	-	2	6.300.000	200%	68,85%	5	21.130.000	100%
Indikator Program			Persentase ketercapaian sasaran program Perangkat Daerah	100%	271.080.658.421	50%	18.752.331.356	100%		37.881.745.489	-	8.702.422.073,00	-	8.860.528.410,00	-	9.158.513.560	-	10.068.812.773	0%	36.790.276.816	0%	97,12%	73%	58.485.104.822	73%
3	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	429	2.256.643.044	38	979.155.003	47	Dokumen	271.962.045	11	37.306.800,00	20	39.061.467,00	4	3.987.500	-	140.003.069	35	220.358.836	19%	81,03%	73	1.199.513.839	17%
9		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29	85.228.415	12	17.500.000	17	Dokumen	9.420.000	7	7.856.800,00	11	625.000,00	4	-	0	600.000	22	9.081.800	132%	96,41%	34	26.581.800	119%
10		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	240	1.872.760.561	18	936.831.003	22	Orang	217.232.049	3	14.365.000,00	3	26.691.967,00	0	2.960.000	14,4091	139.403.069	21	183.420.036	93%	84,44%	39	1.120.251.039	16%

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Tingkat Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2023	
										I		II		III		IV									
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		14= 6 +12		15=	
11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160	298.654.069	8	24.824.000	8	Orang	45.309.996	1	15.085.000,00	6	11.744.500,00	1	1.027.500	7,875	-	16	27.857.000	197%	61,48%	24	52.681.000	15%
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	356	12.080.839.774	604	5.618.959.509	241	Dokumen	790.587.483	16	112.302.017,00	26	297.981.200,00	26	175.939.209	28	211.344.918	95	797.567.344	39%	100,88%		6.416.526.853	0%
12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4	882.532.397	9	318.367.979	1	Paket	70.390.000	-	-	1	-	2	68.267.000,00	0	-	3	68.267.000	300%	96,98%	12	386.634.979	300%
13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	28	3.085.559.470	30	1.946.865.300	7	Paket	116.726.500	-	-	3	109.584.000,00	5	90.000,00	0	23.850.000,00	8	133.524.000	108%	114,39%	38	2.080.389.300	134%
14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8	996.129.086	25	394.771.620	2	Paket	126.002.000	2	11.645.000,00	1	69.531.400,00	0	17.467.500,00	0	23.290.000,00	3	121.933.900	125%	96,77%	28	516.705.520	344%
15		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	296	909.351.362	504	368.641.107	74	Paket	60.838.984	13	13.280.500,00	19	7.961.000,00	18	11.841.500,00	24	23.763.000,00	74	56.846.000	101%	93,44%	578	425.487.107	195%
16		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20	1.445.911.553	36	624.073.472	5	Paket	130.120.000	1	45.000,00	2	8.085.000,00	1	37.100.000,00	3	87.900.000,00	8	133.130.000	152%	102,31%	44	757.203.472	218%
17		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	792	1.434.241.777	396	653.364.700	132	Laporan	130.350.000	127	37.482.710,00	110	32.108.200,00	136	32.985.000,00	0	31.725.000,00	372	134.300.910	282%	103,03%	768	787.665.610	97%
18		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	3.327.114.130	60	1.312.875.331	20	Laporan	156.159.999	6	49.848.807,00	4	70.711.600,00	2	8.188.209,00	3	20.816.918,00	15	149.565.534	77%	95,78%	75	1.462.440.865	63%
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	17	1.083.347.432	10	414.170.000	3	Unit	135.122.600	0	-	5	67.300.000,00	0	-	0	61.100.000	5	128.400.000	167%	95,02%		542.570.000	0%
19		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	1.083.347.432	10	414.170.000	3	Unit	135.122.600	-	-	5	67.300.000,00	0	-	0	61.100.000	5	128.400.000			15	542.570.000	88%
6		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	720	17.021.822.928	964	6.949.691.970	180	Laporan	2.519.006.000	79	453.946.394,00	78	602.847.568,00		610.510.752		784.191.613	157	2.451.496.327	87%	97,32%		9.401.188.297	0%
20		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360	817.648.616	432	194.117.000	90	Laporan	16.196.000	21	5.363.500,00	15	5.466.500,00	20	2.170.000	10,0889	6.800.000	66	19.800.000	74%	122,25%	498	213.917.000	138%
21		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	2.184.871.692	28	959.403.022	12	Laporan	325.560.000	3	94.695.814,00	3	83.849.468,00	19	88.269.153	0	92.902.653	6	359.717.088	52%	110,49%	34	1.319.120.110	71%
22		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	312	14.019.302.620	504	5.796.171.948	78	Laporan	2.177.250.000	76	353.887.080,00	75	513.531.600,00	227	520.071.599	0	684.488.960	94	2.071.979.239	121%	95,16%	598	7.868.151.187	192%
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan	1.695	9.355.091.647	820	2.901.257.720	294	Unit	1.288.673.600	95	148.975.520,00	145	130.523.818,00		303.819.756		462.216.872	240	1.045.535.966	82%	81,13%		6.889.290.336	0%
23		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	1.147.519.173	8	738.693.866	4	Unit	341.440.000	4	28.388.150,00	3	25.930.795,00	11	15.362.254	0	53.206.256	4	122.887.455	100%	35,99%	12	861.581.321	77%
24		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	104	2.734.523.145	50	1.294.577.136	26	Unit	291.653.000	27	81.755.270,00	26	83.042.573,00	18	48.254.000	0	104.382.900	18	317.434.743	68%	108,84%	68	1.612.011.879	65%
25		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.069	202.289.868	678	408.120.500	156	Unit	18.750.000	1	125.000,00	99	-	45	-	0	-	36	125.000	23%	0,67%	714	408.245.500	67%
26		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	432	1.024.594.653	42	459.866.218	101	Unit	104.164.400	60	19.384.400,00	15	10.344.450,00	59	27.373.800,00	0	67.939.150,00	33	125.041.800	33%	120,04%	75	584.908.018	17%
27		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20	1.755.004.750	15	1.184.689.476	2	Unit	208.504.000	-	-	-	-	3	195.065.702	0	9.825.829	1	204.891.531	38%	98,27%	16	1.389.581.007	79%
28		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54	2.491.160.058	27	1.757.807.174	5	Unit	324.162.200	3	19.322.700,00	2	11.206.000,00	17	17.764.000	0	226.862.737	6	275.155.437	111%	84,88%	33	2.032.962.611	60%
8		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	300	228.025.774.796	50	1.434.165.032	50	Orang	32.762.089.781	0	7.948.596.342,00	7	7.713.772.992,00	2	8.022.071.343	12	8.400.782.082	21	32.085.222.759	42%	97,93%		33.519.387.791	0%
29		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	224.528.654.096	50	51	50	Orang/Bulan	32.360.218.255	50	7.948.596.342,00	50	7.713.772.992,00	50	7.992.486.343,00	50	7.989.482.082,00	50	31.644.337.759	100%	97,79%	50	31.644.337.810	100%
30		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	20	2.993.818.200	18	1.357.160.500	5	Paket	326.871.526	-	-	-	-	1,2	23.750.000	4	400.000.000	5	423.750.000	104%	129,64%	23	1.780.910.500	116%

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Tingkat Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2023	
										I		II		III		IV									
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		14= 6 +12		15=	
31		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	200	503.302.500	70	77.004.481	50	Orang	75.000.000	-	-	7	-	1	5.835.000	8	11.300.000	16	17.135.000	32%	22,85%	86	94.139.481	43%
9		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan pelayanan administrasi DPRD yang memenuhi	120	1.257.138.800	43	454.932.122	30	Laporan	114.303.980	1	1.295.000,00	3	9.041.365,00	2	42.185.000	4	9.174.219	11	61.695.584	35%	53,98%		516.627.706	0%
32		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	40	259.020.706	7	56.719.922	10	Dokumen	37.977.991	1	1.295.000,00	2	9.041.365,00	1	1.295.000,00	4	9.174.219,00	9	20.805.584	85%	54,78%	16	77.525.506	39%
33		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	40	265.155.955	21	113.032.200	10	Laporan	23.025.989	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0%	0,00%	21	113.032.200	53%
34		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40	732.962.140	15	285.180.000	10	Laporan	53.300.000	-	-	1	-	1	40.890.000,00	0	-	2	40.890.000	21%	76,72%	17	326.070.000	43%
Rata - rata capaian kinerja (%)																				72,89	94,01			0,08	
Predikat Kinerja																				Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	
2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		263.029.237.544		109.637.689.176		36.348.917.616		7.325.876.279		8.755.968.046		9.444.190.682		13.190.380.435		38.716.415.442		106,51%		148.242.730.308			
Indikator Program			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	100	72.289.903.349	100	19.153.465.190	100 %	5.840.390.300	0%	203.602.625	0%	1.355.681.227,00	0%	1.181.500.375	0%	0%	3.880.613.027,00	0%	66,44%		23.034.078.217	0%		
10	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	120	72.289.903.349	75	19.153.465.190	20	Dokumen	5.840.390.300	0	203.602.625	0	1.355.681.227,00		1.181.500.375		1.139.828.800,00	8	3.880.613.027,00	40%	66,44%		23.034.078.217	0%
35		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	32	1.796.556.732	24	234.356.600	2	Dokumen	247.063.400	-	15.151.625	-	3.421.480,00	0	7.549.000,00	0	97.153.400,00	-	123.275.505,00	0%	49,90%	24	357.632.105	75%
36		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	8.188.107.747	23	3.781.945.540	8	Dokumen	1.914.675.900	-	-	-	75.127.875,00	6	791.940.050,00	0	290.821.900,00	6	1.157.889.825,00	75%	60,47%	29	4.939.835.365	363%
37		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	16	22.941.909.788	5	2.070.734.440	1	Dokumen	692.105.600	-	-	-	-	0	-	1	479.088.500,00	1	479.088.500,00	100%	69,22%	6	2.549.822.940	38%
39		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	32	19.681.664.541	5	2.070.734.440	8	Dokumen	2.704.936.400	-	188.451.000	-	1.277.131.872,00	0	382.011.325,00	1	15.200.000,00	1	1.862.794.197	13%	68,87%	6	3.933.528.637	19%
40		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	32	19.681.664.541	18	10.995.694.170	1	Dokumen	281.609.000	-	-	-	-	0	-	0	257.565.000,00	-	257.565.000	0%	91,46%	18	11.253.259.170	56%
Indikator Program			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	100	9.877.649.485	100	3.244.436.900	100 %	1.757.401.500	0%	-	1%	17.775.250	112%	768.683.220	35%	306.393.225	148%	1.092.851.695	1%	62,19%	192	4.337.288.595	192%	
11	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	104	9.877.649.485	153	3.244.436.900	26	Dokumen	1.757.401.500	-	-	0	17.775.250	29	768.683.220	9	306.393.225,00	39	1.092.851.695	148%	62,19%	192	4.337.288.595	184%
41		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	16	1.957.986.249	48	707.716.800	4	Dokumen	281.486.900	-	-	-	-	7,5	222.905.625	0	-	8	222.905.625	188%	79,19%	56	930.622.425	347%
42		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16	1.655.605.898	16	471.193.250	4	Dokumen	272.941.300	-	-	-	-	0	225.093.750	6,66667	-	7	225.093.750	167%	82,47%	23	696.287.000	142%
43		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	24	1.099.895.132	10	722.879.050	6	Dokumen	306.186.000	-	-	-	-	10	-	0	213.848.225,00	10	213.848.225	167%	69,84%	20	936.727.275	83%
44		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	16	2.390.319.089	54	715.212.800	4	Dokumen	583.086.800	-	-	-	-	2,5	115.129.125	2	92.545.000,00	5	207.674.125	113%	35,62%	59	922.886.925	366%
45		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	16	231.551.690	4	10.080.000	4	Dokumen	33.940.100	-	-	-	-	8,75	15.717.700	0	-	9	15.717.700	219%	46,31%	13	25.797.700	80%
46		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	16	2.542.291.426	21	617.355.000	4	Dokumen	279.760.400	-	-	0	17.775.250,00	0,2489	189.837.020	1	-	1	207.612.270	28%	74,21%	22	824.967.270	138%
Indikator Program			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	100	21.210.082.153	100	8.239.032.170	100	2.490.731.716	24%	652.888.211	24%	441.806.625	15%	531.700.700,00	25%	681.092.550,00	88%	2.307.488.086	1%	92,64%	295	10.435.145.946	295%	

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Tingkat Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2023	
										I		II		III		IV		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K		K		K	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		14= 6 +12		15=	
12	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	236	7.292.626.068	221	1.363.683.100	59	Laporan	719.888.216	16	33.034.450	16,25	276.550.820	9	14.347.450	17	63.282.050	50	387.214.770	85%	53,79%	271	1.750.897.870	115%
47		Pengawasan Urusan Pemerintahanan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	48	732.635.326	50	211.179.000	12	Laporan	89.113.600	3	7.164.325	5	5.155.040,00	5	3.498.000	0	10.410.450,00	14	26.227.815	115%	29,43%	64	237.406.815	133%
48		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	48	717.672.826	49	110.999.000	12	Laporan	89.113.600	1	7.187.625	3	2.646.490,00	0	8.877.325	6	20.605.975,00	11	39.317.415	88%	44,12%	60	150.316.415	124%
49		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	48	717.672.826	49	122.676.500	12	Laporan	89.813.216	2	2.270.000	3	3.878.655,00	1	-	6	6.933.450,00	13	13.082.105	106%	14,57%	62	135.758.605	129%
50		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	48	717.672.826	43	82.301.000	12	Laporan	89.113.600	-	4.813.475	-	4.573.385,00	0	1.139.325	1	9.621.100,00	1	20.147.285	8%	22,61%	44	102.448.285	92%
51		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	1.574.330.736	-	-	1	Laporan	-	4	-	1	-	1	-	1	-	-	0%	0,00%	0	-	0%	
52		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	24	595.482.800	14	116.011.100	6	Dokumen	52.545.200	1	7.852.150	4	4.789.050,00	0	832.800	0	15.711.075,00	5	29.185.075,00	79%	55,54%	19	145.196.175	78%
53		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	16	2.237.158.727	16	720.516.500	4	Dokumen	310.189.000	4	3.746.875	-	255.508.200,00	1	-	2	-	8	259.255.075,00	189%	83,58%	24	979.771.575	147%
13		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	28	13.749.365.177	18	6.619.711.160	7	Dokumen	1.733.972.600	1	619.853.761	0	165.255.805	1	517.353.250		586.598.500,00	2	1.889.061.316,00	33%	108,94%		8.508.772.476	0%
54		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	16	4.110.898.900	9	1.960.570.200	4	Dokumen	506.451.600	1	207.043.175	-	69.883.425,00	1	-	1	212.831.000,00	4	489.757.600,00	92%	96,70%	13	2.450.327.800	79%
55		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12	9.638.466.277	9	4.659.140.960	3	Dokumen	1.227.521.000	-	412.810.586	-	95.372.380,00	0	517.353.250,00	3	373.767.500,00	3	1.399.303.716,00	83%	113,99%	12	6.058.444.676	96%
14		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	8	168.090.908	24	255.637.910	2	Laporan	36.870.900	0	-	0	-	0	-	31.212.000	-	31.212.000	0%	84,65%	24	175.475.600	300%	
56		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8	168.090.908	24	144.263.600	2	Laporan	36.870.900	-	-	-	-	0	-	2	31.212.000,00	2	31.212.000,00	100%	84,65%	26	175.475.600	325%
Indikator Program			Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	159.651.602.557	90	79.000.754.916	A	Nilai	26.260.394.100		6.469.385.443		6.940.704.944				0%	31.435.462.634,00				110.436.217.550	A	
15	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Fungsinya Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	1386	105.000.734.541	1804	52.310.521.941	300	Dokumen	18.044.150.500	80	4.190.371.554	76	3.982.962.044	76	4.809.417.571	108	9.344.326.710,00	184	22.327.077.879,00	61%	123,74%	1988	74.637.599.820	143%
57		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24	11.581.790.210,94	21	5.103.382.654	6	Dokumen	2.617.109.100	3	564.031.000	-	200.712.000,00	1	548.661.661	80	433.820.680,00	84	1.747.225.341,00	1403%	66,76%	105	6.850.607.995	438%
58		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1076	88.876.123.943,66	1.691	47.207.139.287	269	Dokumen	14.750.553.400	71	3.561.380.554	67	3.680.183.794,00	69	4.182.665.910	2	8.514.555.780,00	52	19.938.786.038,00	19%	135,17%	1743	67.145.925.325	162%
59		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	42	1.673.661.633,85	14	-	7	Orang	255.140.000	7	42.000.000	7	63.000.000,00	23	63.000.000	7	84.000.000,00	11	252.000.000	157%	98,77%	25	252.000.000	60%
60		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	96	776.468.555,68	60	-	24	Dokumen	95.847.000	6	22.960.000	9	39.066.250,00	6	12.840.000	23	27.166.250,00	45	102.032.500	186%	106,45%	105	102.032.500	109%
61		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	148	2.092.690.196,91	18	-	1	Dokumen	325.501.000	-	-	-	-	0	2.250.000	3	284.784.000,00	3	287.034.000	308%	88,18%	21	287.034.000	14%

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Tingkat Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2023	
										I		II		III		IV									
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		14= 6 +12		15=	
16		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD	728	54.650.868.016,07	418	26.690.232.975	182	Dokumen	8.216.243.600	38	2.279.013.889	40	2.957.742.900	31	2.152.888.816	28	1.718.739.150,00	137	9.108.384.755	75%	110,86%	555	35.798.617.730	76%
62		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	464	43.395.467.119,57	259	23.584.395.540	116	Dokumen	6.761.634.600	10	1.941.655.634	25	2.803.835.600,00	11	1.923.987.800	8	1.108.485.000,00	54	7.777.964.034	47%	115,03%	313	31.362.359.574	67%
63		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	24	1.853.935.511,00	19	739.734.750	6	Laporan	339.478.000	6	163.028.250	-	66.317.500,00	0	7.199.460	0	-	6	236.545.210	100%	69,68%	25	976.279.960	104%
64		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	96	334.888.518,34	70	66.372.040	24	Dokumen	26.250.000	3	2.099.125	4	3.710.000,00	3	4.270.000	4	4.515.000,00	14	14.594.125	58%	55,60%	84	80.966.165	88%
65		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	144	9.066.576.867,16	70	2.299.730.645	36	Dokumen	1.088.881.000	19	172.230.880	11	83.879.800,00	17	217.431.556	16	605.739.150,00	63	1.079.281.386	175%	99,12%	133	3.379.012.031	92%
Rata - rata capaian kinerja (%)																					63,38	87,23			1,17
Predikat Kinerja																					Rendah	Tinggi			Sangat Rendah
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program									79.625.348.653,00									80.824.043.736				228.163.097.567			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					68,13	90,62			0,66
Predikat Kinerja																					Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya :																									

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	Keterangan
1.	91% ≤ 100%	Nama Instansi
2.	76% ≤ 90%	Nama Program
3.	66% ≤ 75%	Capaian Kinerja Per Kegiatan
4.	51% ≤ 65%	Total Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program
5.	≤ 50%	

Gresik
SEK
KABU

Ir. MOKHA
Pem
NIP. 19

at Capaian dan Realisasi ran Renstra ahun 2021 s/d 26 (%)	Unit SKPD Penanggungja wab	Keterang an
Rp.		
14/5x100	16	17
39,52%	SEKRETARI AT DPRD	
25,43%	Bagian Program dan Keuangan	
100,00%	Bagian Program dan Keuangan	
59,05%		
78,75%		
48,96%		
38,41%		
48,77%		
49,25%		
41,43%		
59,28%		
21,35%		
19,09%		
21,57%	Bagian Umum	
53,15%		
31,19%		
59,82%		

st Capaian dan Realisasi an Renstra ahun 2021 s/d 26 (%)	Unit SKPD Penanggungja wab	Keterang an
Rp.		
14/5x100	16	17
17,64%		
53,11%		
43,81%		
67,42%		
51,87%		
46,79%		
52,37%		
54,92%		
43,96%		
50,08%		
50,08%		
55,23%		
26,16%		
60,38%		
56,12%		
73,64%		
75,08%		
58,95%		
201,81%		
57,09%		
79,18%		
81,61%		
14,70%		
14,09%		
59,49%		

st Capaian dan Realisasi ran Renstra ahun 2021 s/d 26 (%)	Unit SKPD Penanggungja wab	Keterang an
Rp.		
14/5x100	16	17
18,70%		
41,10%		
29,93%		
42,63%		
44,49%		
0,35		
Sangat Rendah		
56,36%		
31,86%	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	
168,51%		
19,91%		
60,33%		
11,11%		
19,99%		
57,18%		
43,91%	Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi	
43,91%		
47,53%		
42,06%		
85,17%		
38,61%		
11,14%		
32,45%		
190,29%	Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi	

at Capaian dan Realisasi dan Renstra tahun 2021 s/d 26 (%)	Unit SKPD Penanggungja wab	Keterang an
Rp.		
14/5x100	16	17
24,01%		
32,40%		
20,94%		
18,92%		
14,28%		
0,00%		
24,38%		
43,80%		
61,88%		
59,61%		
62,86%		
104,39%		
104,39%		
100,00%	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	
71,08%		
59,15%		
75,55%		
15,06%		
13,14%		
13,72%		

st Capaian dan Realisasi ran Renstra ahun 2021 s/d 26 (%)	Unit SKPD Penanggungja wab	Keterang an
Rp.		
14/5x100	16	17
65,50%		
72,27%		
52,66%		
24,18%		
37,27%		
0,77		
Sangat Rendah		
0,73		
Sangat Rendah		

: 3 Januari 2024
 RETARIS DPRD
 JPATEN GRESIK

MMAD NAIKH, M.M.
 bina Utama Muda
 96804121992031011

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten/Kota : Gresik
Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD
Periode Renja PD : 2023
Periode RKA PD : 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	FORMULASI	Target		Realisasi																				Capaian							
								Kinerja	Satuan	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agst		Sept		Okt		Nop		Des		Jumlah	Persen		
										K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%	K	%				
4	02	1			SEKRETARIAT DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi dibagi Jumlah Pelaksanaan tugas DPRD Berdasarkan Renja DPRD dikali 100%	100	%	4%		10%		9%		7%		8%		8%		7%		11%		9%		7%		8%		9%		96%			
4	02	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						20%		20%		9%		12%		9%		9%		17%		9%		9%		12%		8%		19%		131%		
Indikator Program					Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP dari Inspektorat Kabupaten	A	Nilai	10%	20%	10%	20%	9%	9%	10%	12%	9%	9%	9%	9%	10%	17%	9%	9%	9%	9%	8%	12%	8%	8%	8%	19%	110%	100%			
4	02	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13	Dokumen	4	31%	4	31%	1	8%	2	15%	1	8%	1	8%	3	23%	1	8%	1	8%	2	15%	1	8%	4	31%	25	205%		
4	02	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	-	0%	1	25%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	25%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2	50%	4	100%		
4	02	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	3	50%	1	17%	1	17%	2	33%	1	17%	1	17%	2	33%	1	17%	1	17%	2	33%	1	17%	1	17%	17	283%		
4	02	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	1	33%	2	67%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1	33%	4	133%			
4	02	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	1153	Dokumen	109	9%	109	9%	109	9%	109	9%	109	9%	109	9%	109	9%	115	10%	109	9%	109	9%	89	8%	89	8%	89	8%	1.155	109%
4	02	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/bulan	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%		
4	02	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1138	Dokumen	100	9%	100	9%	100	9%	100	9%	100	9%	100	9%	100	9%	100	9%	100	9%	80	7%	80	7%	80	7%	1.140	100%		
4	02	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5	100%		
4	02	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9	Laporan	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%	9	100%		
4	02	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	100%		
Indikator Program					Persentase ketercapaian sasaran program Perangkat Daerah	Jumlah capaian program minimal 76%/jumlah program	100	%	0%	1%	0%	17%	0%	7%	0%	0	0%	-	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%		
4	02	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	47	Dokumen	0	0%	8	17%	3	6%	5	11%	0	0%	14	30%	1	2%	3	6%	1	2%	5	11%	11	23%	5	11%	56	121%		
4	02	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17	Dokumen	-	0%	4	24%	3	18%	-	0%	0	0%	11	65%	1	6%	2	12%	1	6%	-	0%	-	0%	-	0%	22	129%		
4	02	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	Orang	-	0%	3	14%	-	0%	0	0%	0	0%	3	14%	-	0%	-	0%	-	0%	5	23%	4	18%	5	23%	20	91%		
4	02	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	Orang	-	0%	1	13%	-	0%	5	63%	-	0%	-	0%	-	0%	1	13%	-	0%	-	0%	7	88%	-	0%	14	175%		
4	02	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	1. Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan	241	Dokumen	11	5%	69	29%	67	28%	-	0%	-	0%	140	58%	51	21%	57	24%	53	22%	8	3%	11	5%	11	5%	478	199%		
4	02	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	1	100%	1	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2	200%		
4	02	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7	Paket	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3	43%	3	43%	1	14%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7	100%		
4	02	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	Paket	-	0%	1	50%	-	0%	0	0%	0	0%	1	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%	2	100%		
4	02	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	74	Paket	-	0%	-	0%	13	18%	-	0%	0	0%	19	26%	6	8%	6	8%	6	8%	8	11%	8	11%	8	11%	74	100%		
4	02	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	Paket	-	0%	1	20%	-	0%	0	0%	0	0%	2	40%	0	0%	0	0%	1	20%	-	0%	2	40%	1	20%	7	140%		
4	02	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	132	Laporan	11	8%	63	48%	52	39%	0	0%	0	0%	110	83%	40	30%	50	38%	45	34%	-	0%	0	0%	0	0%	371	281%		
4	02	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	-	0%	4	20%	2	10%	0	0%	0	0%	4	20%	1	5%	0	0%	1	5%	-	0%	1	5%	2	10%	15	75%		
4	02	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	3	Unit	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	167%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	222%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	FORMULASI	Target		Realisasi																Capaian									
								Kinerja	Satuan	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agst		Sept		Okt		Nop		Des		Jumlah	Persen
4	02	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	0	0%	5	167%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	167%
4	02	1	2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	180	Laporan	0	0%	98	54%	1	1%	0	0%	0	0%	93	52%	87	48%	89	49%	87	48%	0	0%	8	4%	2	1%	465	260%
4	02	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90	Laporan	-	0%	21	23%	-	0%	0	0%	0	0%	15	17%	6	7%	8	9%	6	7%	0	0%	8	9%	2	2%	66	73%
4	02	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	-	0%	2	17%	1	8%	0	0%	0	0%	3	25%	6	50%	6	50%	6	50%	0	0%	0	0%	0	0%	24	200%
4	02	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78	Laporan	-	0%	75	96%	-	0%	0	0%	0	0%	75	96%	75	96%	75	96%	75	96%	0	0%	0	0%	0	0%	375	481%
4	02	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	294	Unit	0	0%	46	16%	47	16%	0	0%	0	0%	145	49%	53	18%	66	22%	27	9%	0	0%	0	0%	0	0%	384	131%
4	02	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	-	0%	3	75%	-	0%	-	0%	-	0%	3	75%	3	75%	3	75%	3	75%	-	0%	0	0%	0	0%	15	375%
4	02	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	Unit	-	0%	26	100%	-	0%	-	0%	-	0%	26	100%	11	42%	3	12%	3	12%	-	0%	0	0%	0	0%	69	265%
4	02	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	156	Unit	-	0%	1	1%	-	0%	-	0%	-	0%	99	63%	19	12%	11	7%	15	10%	-	0%	0	0%	0	0%	145	93%
4	02	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	101	Unit	-	0%	15	15%	45	45%	-	0%	-	0%	15	15%	15	15%	42	42%	1	1%	-	0%	0	0%	0	0%	133	132%
4	02	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%	-	0%	0	0%	0	0%	2	100%
4	02	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	-	0%	1	20%	2	40%	0	0%	0	0%	2	40%	5	100%	5	100%	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%	20	400%
4	02	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	50	Orang	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7	14%	1	2%	0	0%	1	2%	0	0%	0	0%	12	24%	21	42%
4	02	1	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	Orang/Bulan	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%
4	02	1	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	Paket	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	20%	-	0%	-	0%	0	0%	0	0%	4	80%	5	100%
4	02	1	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	Orang	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7	14%	-	0%	-	0%	1	2%	-	0%	-	0%	8	16%	16	32%
4	02	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Jumlah laporan pelayanan administrasi DPRD yang terpenuhi	30	Laporan	0	0%	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	3	10%	1	3%	1	3%	0	0%	1	3%	2	7%	1	3%	10	34%
4	02	1	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	10	Dokumen	-	0%	1	10%	-	0%	-	0%	-	0%	2	20%	1	10%	-	0%	-	0%	1	10%	2	20%	1	10%	8	80%
4	02	1	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	10	Laporan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
4	02	1	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	10	Laporan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	10%	-	0%	1	10%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	2	20%
4	02	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			596	Kegiatan	25	1%	59	10%	54	8%	42	3%	47	4%	46	4%	44	7%	65	18%	51	11%	40	5%	46	13%	53	18%	572	96%
Indikator Program						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi regulasi DPRD berdasarkan Renja DPRD dikali 100	100	%	0%	0%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	60%	5%	5%	0%	0%	20%	20%	90%	100%
4	02	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Jumlah dokumen hasil kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	20	Dokumen	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	12	60%	1	5%	0	0%	4	20%	19	94%
4	02	2	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2	Dokumen	-	0%	1	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	50%	-	0%	0	0%	2	100%
4	02	2	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	-	0%	6	75%	-	0%	0	0%	3	38%	9	113%
4	02	2	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	1	100%
4	02	2	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6	75%	-	0%	0	0%	0	0%	6	75%
4	02	2	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	1	100%	1	100%
						Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD berdasarkan Renja DPRD dikali 100	100	%	0%	0%	0%	7%	0%	1%	0%	4%	0%	5%	0%	5%	27%	8%	88%	24%	0%	1%	8%	8%	8%	8%	15%	36%	146%	285%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	FORMULASI	Target		Realisasi																		Capaian									
							Kinerja	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah	Persen														
4	02	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	Jumlah laporan hasil kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	26	Dokumen	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7	27%	23	88%	0	0%	2	8%	2	8%	4	15%	38	151%			
4	02	2	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2	50%	5	125%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%		7	175%		
4	02	2	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	6	150%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6	150%			
4	02	2	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	2	33%	2	33%	2	33%	6	100%			
4	02	2	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	8	200%	0	0%	-	0%	0	0%	0	0%	8	200%			
4	02	2	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	25%	1	25%	0	0%		0%	-	0%	2	50%	4	100%			
4	02	2	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%		0%		0%	-	0%	4	100%	3	75%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	7	175%	
Indikator Program					Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Berdasarkan Renja DPRD dikali 100			100	%	0%	0%	21%	16%	7%	11%	7%	3%	10%	4%	10%	4%	4%	2%	7%	7%	4%	2%	6%	2%	9%	24%	12%	25%	99%	233%
4	02	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	59	Laporan	-	0%	12	20%	3	5%	5,00	8%	7,00	12%	7,00	12%	3,00	5%	4,00	7%	3,00	5%	4,00	7%	4,00	7%	6,00	10%	58	100%	
4	02	2	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahanan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	Laporan	-	0%	2	17%	3	25%	1	8%	1	8%	2	17%	1	8%	1	8%	1	8%	-	0%	0	0%	0	0%	12	100%	
4	02	2	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	Laporan	-	0%	3	25%	-	0%	1	8%	2	17%	2	17%	1	8%	2	17%	2	17%	-	0%	0	0%	0	0%	13	108%	
4	02	2	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	Laporan	-	0%	1	8%	-	0%	1	8%	1	8%	1	8%	-	0%	0	0%	-	0%	2	17%	2	17%	2	17%	10	83%	
4	02	2	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	Laporan	-	0%	2	17%	-	0%	1	8%	1	8%	1	8%	1	8%	-	0%	-	0%	2	17%	2	17%	2	17%	12	100%	
4	02	2	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	Laporan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%	-	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
4	02	2	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	6	Dokumen	-	0%	3	50%	-	0%	-	0%	1	17%	-	0%	-	0%	1	17%	-	0%	-	0%	-	0%	1	17%	6	100%	
4	02	2	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4	Dokumen	-	0%	1	25%	-	0%	1	25%	1	25%	1	25%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	0	0%	4	100%	
4	02	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	7	Dokumen	-	0%	2	29%	2	29%	-	0%	-	0%	-	0%	1	14%	-	0%	-	0%	1	14%	1	14%	7	112%			
4	02	2	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4	Dokumen	-	0%	2	50%	1	25%	-	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	1	25%	4	100%	
4	02	2	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	-	0%	-	0%	1	33%	-	0%	0	0%	-	0%	-	0%	1	33%	-	0%	-	0%	1	33%	-	0%	3	100%	
4	02	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	Jumlah laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	2	kali	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	50%	1	50%	2	125%	
4	02	2	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	Laporan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1	50%	1	50%	2	100%	
Indikator Program					Nilai Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai kualitas hasil survei indeks kepuasan Anggota DPRD			90	Nilai	5%	4%	9%	9%	10%	11%	8%	7%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	8%	7%	7%	7%	6%	8%	7%	8%	7%	93%	100%	
4	02	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	300	Dokumen	25	8%	31	10%	24	8%	25	8%	27	9%	24	8%	24	8%	25	8%	27	9%	24	8%	28	9%	28	9%	312	104%	
4	02	2	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	Dokumen	-	0%	3	50%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	17%	-	0%	0	0%	2	33%	6	100%	
4	02	2	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	269	Dokumen	25	9%	23	9%	23	9%	22	8%	24	9%	21	8%	22	8%	23	9%	24	9%	23	9%	27	10%	24	9%	281	104%	
4	02	2	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Orang	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	7	100%	
4	02	2	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	24	Dokumen	-	0%	5	21%	1	4%	3	13%	3	13%	3	13%	2	8%	2	8%	2	8%	1	4%	1	4%	1	4%	24	100%	
4	02	2	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%	1	100%	1	100%	
4	02	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas DPRD	182	Dokumen	-	0%	13	7%	25	14%	12	7%	13	7%	15	8%	10	5%	12	7%	9	5%	9	5%	10	5%	9	5%	137	76%	
4	02	2	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	116	Dokumen	-	0%	7	6%	3	3%	8	7%	8	7%	9	8%	4	3%	5	4%	2	2%	1	1%	3	3%	4	3%	54	47%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	FORMULASI	Target		Realisasi																		Capaian									
								Kinerja	Satuan	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agst		Sept		Okt		Nop		Des		Jumlah	Persen		
4	02	2	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	6	Laporan	-	0%	1	17%	5	83%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%	0	0%	6	100%
4	02	2	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24	Dokumen	-	0%	2	8%	1	4%	1	4%	1	4%	2	8%	1	4%	1	4%	1	4%	1	4%	1	4%	2	8%	1	4%	14	58%
4	02	2	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36	Dokumen	-	0%	3	8%	16	44%	3	8%	4	11%	4	11%	5	14%	6	17%	6	17%	7	19%	5	14%	4	11%	63	175%		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Gresik
Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik
Periode Pelaksanaan : Tahun 2022

Sasaran RKPd yang akan dicapai dalam Renja Sekretariat DPRD :
Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Keterangan		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		14= 6 +12		15= 14/5x100		16	17		
		SEKRETARIAT DPRD			528.408.160.465		159.252.265.901		83.163.256.100,00		16.204.200.219		21.501.745.450		17.359.768.833		24.109.657.893		79.175.372.395		95,20%			240.647.615.062		45,54%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.905.306.129		85.535.260.888		46.672.853.616,00		10.122.109.749		11.573.220.120		10.131.090.102		11.918.532.701		43.744.952.672		93,73%			131.724.616.236		52,50%			
		Indikator Program	Tercapainya nilai SAKIP OPD dengan predikat memuaskan	A	32.209.484.000	A	10.241.782.907	A	Nilai		1.006.685.262		1.610.720.811		1.535.497.670		1.328.446.617		5.481.350.360		76,29%			16.117.910.958	A	100,00%	Bagian Program dan Keuangan		
	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	140	2.730.295.790	71	1.076.886.842	23	Jenis		639.640.000,00	26	114.607.787	23	170.167.740	22	165.418.100	28	179.563.005	35	629.756.632	153%	98,45%	73	1.706.643.474	52%	62,51%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	68	1.176.124.080	22	587.277.542	11	dokumen		320.857.000,00	3	99.070.787	1	67.064.740	0	107.320.600	6	89.395.505,00	10	362.851.632	91%	113,09%	32	950.129.174	47%	80,78%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja laporan monitoring dan evaluasi Renja OPD	48	736.785.600	33	290.529.800	8	laporan		175.493.000,00	22	1.535.000	21	66.853.000	21	43.428.000	21	43.480.500,00	21	155.296.500	266%	88,49%	21	445.826.300	44%	60,51%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Renja OPD	24	817.386.110	16	199.079.500	4	laporan		143.290.000,00	1	14.002.000	1	36.250.000	1	14.669.500	1	46.687.000	4	111.608.500	100%	77,89%	20	310.688.000	83%	38,01%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	743	29.479.188.210	226	9.164.896.065	119	Jenis		6.545.157.000,00	108	892.077.475	103	1.440.553.071		1.370.079.570		1.148.883.612	109	4.851.593.728	92%	74,12%	108	14.411.267.484	3%	48,89%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Perangkat Daerah	221	27.365.866.131	72	9.164.896.065	36	Orang		6.294.167.000,00	36	860.357.475	36	1.406.555.321	36	1.301.549.820	36	1.088.925.762	36	4.657.388.378	100%	74,00%	108	13.822.284.443	49%	50,51%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah rekening sub kegiatan Perangkat Daerah	408	842.108.058	126	276.652.600	64	sub kegiatan		183.760.000,00	64	22.690.000	64	20.352.750	64	61.114.750	64	47.393.850	64	151.551.350	100%	82,47%	190	428.203.950	47%	50,85%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah akhir tahun	30	445.932.800	10	83.946.000	5	laporan		17.250.000,00	5	2.520.000	-	8.035.000	0	0	0	4.314.000	5	14.869.000	100%	86,20%	15	98.815.000	50%	22,16%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	78	431.540.800	16	26.764.091	13	laporan		35.580.000,00	3	6.510.000	3	5.610.000	4	0	3	8.250.000	3	20.370.000	25%	57,25%	20	47.134.091	25%	10,92%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	6	393.740.421	2	7.415.000	1	laporan		14.400.000,00	-	-	-	0	1	7.415.000	0	-	1	7.415.000	100%	51,49%	3	14.830.000	50%	3,77%		
		Indikator Program	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	218.695.822.129	100	75.293.477.981	100 %			39.488.056.616,00	100	9.115.424.487	100	9.962.499.309	107	8.595.592.432	66	10.590.086.084	1.263	38.263.602.312	1263%	96,90%	36	115.606.705.278	36%	52,86%	Bagian Umum	
	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah data dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	108	5.038.626.256	27	720.258.432	18	Jenis		291.440.000,00	4	116.154.000	4	35.518.020	1	12.412.000	-	94.812.551	9	258.896.571	13%	88,83%	36	979.155.003	33%	19,43%		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian	24	134.612.080	8	9.875.000	4	data		12.900.000,00	2	5.375.000	1	0	1	-	0	2.250.000	4	7.625.000	100%	59,11%	12	17.500.000	50%	13,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan diklat pegawai berdasarkan tusi	60	4.578.466.756	13	697.971.432	10	diklat		233.230.000,00	1	110.779.000	3	35.518.020	0	-	1	92.562.551	5	238.859.571	50%	102,41%	18	936.831.003	30%	20,46%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	24	325.547.420	6	12.412.000	4	kali		45.310.000,00	1	-	-	0	1	12.412.000	0	0	2	12.412.000	50%	27,39%	8	24.824.000	33%	7,63%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan dan jumlah kegiatan rapat	1.176	9.731.209.870	399	4.117.723.221	196	Jenis		1.424.212.700,00	56	476.372.585	48	442.907.457	45	202.344.076	56	379.612.170	205	1.501.236.288	105%	105,41%		5.618.959.509	0%	57,74%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18	786.286.854	6	209.748.762	3	jenis		110.347.200,00	-	-	3	108.619.217	0	-	0	0	3	108.619.217	100%	98,43%	9	318.367.979	50%	40,49%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	36	1.371.917.777	18	1.563.661.900	6	jenis		370.613.500,00	4	329.917.400	2	11.661.000	0	-	6	41.625.000	12	383.203.400	200%	103,40%	30	1.946.865.300	83%	141,91%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan Peralatan Rumah Tangga	36	855.114.021	16	270.453.970	6	jenis		126.002.400,00	6	12.155.000	-	69.233.400	0	18.398.250	3	24.531.000	9	124.317.650	150%	98,66%	25	394.771.620	69%	46,17%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	1.008	830.923.439	336	242.383.462	168	jenis		116.410.000,00	42	34.042.185	42	22.605.490	42	32.129.800	42	37.480.170	168	126.257.645	100%	108,46%	504	368.641.107	50%	44,37%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	78	1.187.375.042	23	442.296.396	13	jenis		207.411.600,00	4	475.000	1	12.415.650	3	56.506.426	5	112.380.000	13	181.777.076	100%	87,64%	36	624.073.472	46%	52,56%		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	792	1.198.991.660	264	443.258.600	132	rapat		198.510.000,00	33	46.325.000	33	70.400.000	33	42.958.100	33	50.423.000	132	210.106.100	100%	105,84%	396	653.364.700	50%	54,49%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120	3.500.601.078	40	945.920.131	20	kali		294.918.000,00	6	53.458.000	6	147.972.700	5	52.351.500												

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Keterangan
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		14= 6 +12		15= 14/5x100		16	17
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	84	1.013.133.872	28	314.181.818	14 jenis	134.321.200,00	5	15.205.000	5	31.529.250	4	25.902.050	0	73.048.100,00	14	145.684.400	100%	108,46%	42	459.866.218	50%	45,39%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	30	1.910.707.168	10	754.411.135	5 jenis	250.000.000,00	1	43.010.000	-	195.755.921	4	-	0	191.512.420,00	5	430.278.341	100%	172,11%	15	1.184.689.476	50%	62,00%		
				12		7		2 paket		1		-		1		3		5		2,5		12		100%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	54	4.416.963.527	18	1.295.213.851	9 jenis	277.946.716,00	3	911.000	3	180.524.032	3	16.497.000	0	264.661.291,13	9	462.593.323	100%	166,43%	27	1.757.807.174	50%	39,80%		
				42		24		7 orang		-		-		0		0		-		0		24		57%			
				24		11		4 paket		2		-		2		3		7				18		75%			
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	300	177.382.791.223	100	63.400.314.394	50 Orang	33.413.253.000,00	50	7.886.665.476	50	8.136.918.593	50	7.448.084.667		8.286.014.174,00	50	31.757.682.910	100%	95,05%		95.157.997.304	0%	53,65%		
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD	300	173.469.449.011	100	62.412.913.413	50 orang	32.912.253.000,00	50	7.885.268.976	50	8.136.343.093	50	7.448.084.667	50	7.841.222.174,00	50	31.310.918.910	100%	95,13%	150	93.723.832.323	50%	54,03%		
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	36	3.490.267.212	12	935.790.500	6 jenis	426.000.000,00	-	-	-	-	0	-	6	421.370.000,00	6	421.370.000	100%	98,91%	18	1.357.160.500	50%	38,88%		
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah layanan medical check up DPRD	300	423.075.000	49	51.610.481	50 orang	75.000.000,00	2	1.396.500	-	575.500	0	-	19	23.422.000,00	21	25.394.000	42%	33,86%	70	77.004.481	23%	18,20%		
		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah layanan administrasi DPRD	132	1.836.233.692	30	320.254.161	22 Jenis	164.372.000,00	7	4.300.000	8	33.128.000	11	50.134.461	8	47.115.500,00	13	134.677.961	59%	81,93%		454.932.122	0%	24,78%		
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah layanan administrasi keanggotaan DPRD	30	474.254.430	4	29.239.961	5 jenis	38.608.000,00	-	-	-	-	3	18.834.461	0	8.645.500,00	3	27.479.961	60%	71,18%	7	56.719.922	23%	11,96%		
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan administrasi Fraksi DPRD	42	797.879.262	14	100.429.200	7 jumlah fraksi	25.564.000,00	7	-	7	12.603.000	7	-	7	-	7	12.603.000	100%	49,30%	21	113.032.200	50%	14,17%		
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	60	564.100.000	12	190.585.000	10 kali	100.200.000,00	-	4.300.000	1	20.525.000	1	31.300.000	1	38.470.000,00	3	94.595.000	30%	94,41%	15	285.180.000	25%	50,55%		
Rata - rata capaian kinerja (%)																				104,59	100,04			0,07	0,34		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			277.502.854.337		73.717.005.013		36.490.402.484,00	26%	6.082.090.470	0%	9.928.525.330	0%	7.228.678.731	0%	12.191.125.192	8	35.430.419.723				108.922.998.826				
Indikator Program			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	100	67.074.415.668	100	10.909.984.170	100 %	8.995.008.500,00	5%	633.806.100,00	16%	1.917.410.140,00		435.376.470			21%	6.172.746.580,00	0%	68,62%		17.082.730.750	0%	25,47%	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	
	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	174	67.074.415.668	49	10.909.984.170	38 kali	8.995.008.500,00	2	633.806.100,00	6	1.917.410.140,00		435.376.470		3.186.153.870,00	21	6.172.746.580,00	55%	68,62%		17.082.730.750	0%	103,90%		
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan pembahasan program pembentukan Perda	48	20.050.557.999	16	120.638.800	8 kali	321.663.000,00	2	4.790.000,00	2	5.215.500	0	19.356.000	4	84.356.300,00	8	113.717.800,00	100%	35,35%	24	234.356.600	50%	1,17%		
		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah kegiatan pembahasan rancangan Perda	48	8.630.385.729	15	2.357.565.820	18 kali	1.803.741.000,00	-	690.000,00	-	331.741.000	4	323.408.470	4	768.540.250,00	8	1.424.379.720,00	44%	78,97%	23	3.781.945.540	48%	43,82%		
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan	54	11.283.709.281	4	1.314.686.170	4 kali	3.947.435.000,00	-	521.196.100,00	-	32.676.000	0	2.800.000	1	199.376.170,00	1	756.048.270,00	25%	19,15%	5	2.070.734.440	9%	18,35%		
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah fasilitasi pelaksanaan proses penyusunan naskah akademik dan Ranperda inisiatif DPRD	24	27.109.762.659	14	7.117.093.380	8 kegiatan	2.922.169.500,00	-	107.130.000,00	4	1.547.777.640	0	89.812.000	0	2.133.881.150,00	4	3.878.600.790	50%	132,73%	18	10.995.694.170	75%	40,56%		
Indikator Program			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	100	11.180.604.808	100	2.068.430.000	100 %	1.423.350.400,00	-	-	-	6.400.000	-	876.051.400	-	293.555.500	0%	1.176.006.900	0%	82,62%	92	3.244.436.900	92%	29,02%	Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi	
	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	252	11.180.604.808	92	2.068.430.000	26 kali	1.423.350.400,00	-	-	-	6.400.000		876.051.400		293.555.500,00	-	1.176.006.900	0%	82,62%	92	3.244.436.900	37%	29,02%		
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah kegiatan penyusunan KUA dan PPAS	24	2.346.468.712	26	464.993.900	4 kali	301.911.000,00	-	-	-	-	4	242.722.900	18	-	22	242.722.900	550%	80,40%	48	707.716.800	200%	30,16%		
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah kegiatan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan	24	2.346.468.712	10	240.348.250	4 kali	291.931.000,00	-	-	-	-	6	214.420.000	0	16.425.000,00	6	230.845.000	150%	79,08%	16	471.193.250	67%	20,08%		
		Pembahasan APBD	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	60	869.859.540	10	478.795.550	4 kali	131.450.000,00	-	-	-	-	0	-	0	244.083.500,00	-	244.083.500	0%	185,69%	10	722.879.050	17%	83,10%		
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah kegiatan pembahasan APBD Perubahan	60	2.828.514.282	31	475.895.800	2 kali	366.289.000,00	-	-	-	-	8	206.270.000,00	15	33.047.000,00	23	239.317.000	1150%	65,34%	54	715.212.800	90%	25,29%		
		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah kegiatan pembahasan laporan semester	24	266.140.600	2	5.040.000	2 kali	41.800.000,00	-	-	-	-	1	5.040.000	1	-	2	5.040.000	100%	12,06%	4	10.080.000	17%	3,79%		
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah kegiatan pembahasan pertanggungjawaban APBD	60	2.523.152.962	13	403.356.500	10 kali	289.969.400,00	-	-	5	6.400.000	1	207.598.500	2	0	8	213.998.500	80%	73,80%	21	617.355.000	35%	24,47%		
Indikator Program			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	100	23.465.294.117	100	5.534.557.120	100	3.010.539.600,00		418.459.500,00		941.733.250	#REF!	447.219.400,00	#REF!	1.010.114.500,00	#REF!	2.817.526.650	#REF!	93,59%	245	8.127.657.860	245%	152,35%	Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi	
	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	330	8.357.394.237	171	942.037.400	26 kali	886.534.000,00	8	27.730.000,00	8	309.278.000	5	23.296.800	29	61.340.900	50	421.645.700	192%	47,56%	221	1.363.683.100	67%	16,32%		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	54	1.070.420.040	39	145.983.500	4 laporan	109.747.500,00	2	7.760.000,00	2	34.545.500	1	5.320.000	6	17.570.000	11	65.195.500	275%	59,40%	50	211.179.000	93%	19,73%		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	54	1.070.420.040	39																					

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Keterangan	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		14= 6 +12		15= 14/5x100		16	17	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	54	1.070.420.040	39	94.456.500	4	laporan	109.747.500,00	3	10.350.000,00	1	5.955.000	0	2.915.000	6	9.000.000	10	28.220.000	250%	25,71%	49	122.676.500	91%	11,46%		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	54	1.070.420.040	34	61.011.000	4	laporan	109.747.500,00	1	4.585.000,00	1	3.465.000	1	4.240.000	6	9.000.000	9	21.290.000	225%	19,40%	43	82.301.000	80%	7,69%		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	54	1.070.420.040	-	-	4	laporan	37.995.000,00	-	-	-	-	0	-	0	0	-	-	0%	0,00%	0	-	0%	0,00%		
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	48	532.281.200	11	84.453.400	4	kali	83.600.000,00	-	-	2	13.380.000	1	4.196.800	0	13.980.900	3	31.557.700,00	75%	37,75%	14	116.011.100	29%	21,80%		
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	12	2.473.012.837	9	474.434.000	2	kali	325.949.000,00	1	-	1	246.082.500	0	-	5	0	7	246.082.500,00	350%	75,50%	16	720.516.500	133%	29,14%		
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	36	14.950.671.130	12	4.295.962.010	6	kali	2.098.295.600,00	2	390.729.500,00	2	632.455.250	0	414.513.800		886.050.600,00	4	2.323.749.150,00	67%	110,74%		6.619.711.160	0%	44,28%		
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	18	5.520.218.105	6	1.245.149.200	3	kali	641.240.000,00	1	213.989.500,00	1	279.887.000	0	-	1	221.544.500	3	715.421.000,00	100%	111,57%	9	1.960.570.200	50%	35,52%		
		Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan kegiatan Reses DPRD	18	9.430.453.025	6	3.050.812.810	3	kali	1.457.055.600,00	1	176.740.000,00	1	352.568.250	0	414.513.800	1	664.506.100	3	1.608.328.150,00	100%	110,38%	9	4.659.140.960	50%	49,41%		
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	96	157.228.750	12	296.557.710	2	kali	25.710.000,00	0	-	4	-	8	9.408.800		62.723.000	12	72.131.800	600%	280,56%	24	144.263.600	25%	91,75%		
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah rapat kerja Badan kehormatan DPRD dan kegiatan pengawasan kode etik DPRD	96	157.228.750	12	72.131.800	2	kali	25.710.000,00	-	-	4	-	8	9.408.800	0	62.723.000	12	72.131.800,00	600%	280,56%	24	144.263.600	25%	91,75%		
Indikator Program			Tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat dengan hasil Sangat Baik	90	175.782.539.744	90	55.204.033.723	90	Nilai	23.061.503.984,00		5.029.824.870,00		7.062.981.940					25.264.139.593,00				80.468.173.316	A	100,00%	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan		
	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	2892	101.861.960.125	1221	36.206.645.068	533	kali	15.261.606.300,00	180	3.026.409.270,00	185	4.926.149.540	197	3.813.227.461	155	5.805.509.002,00	561	17.571.295.273,00	105%	115,13%		53.777.940.341	0%	52,79%		
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah kegiatan bimtek DPRD	36	18.738.373.882,00	15	3.307.130.877	5	kali	1.756.314.000,00	1	238.647.400,00	2	478.620.500	2	313.331.401	1	765.652.476	6	1.796.251.777,00	120%	102,27%	21	5.103.382.654	58%	27,23%		
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	90	73.273.322.203,56	58	32.013.422.991	15	jenis	12.811.374.000,00	45	2.730.091.870,00	45	4.360.219.040,00	45	3.422.856.060	45	4.680.549.326	45	15.193.716.296,00	300%	118,60%	103	47.207.139.287	114%	64,43%		
			Jumlah publikasi advetorial/iklan DPRD di media massa	2250		1.055		425	kali		120		122		123		90		455		107%		1510		67%			
			Jumlah produk legeslasi DPRD yang dipublikasikan	72		36		12	Perda		4		4		7		9		24		200%		60		83%			
			Jumlah publikasi kegiatan DPRD	30		11		7	kali		1		2		1		3		7		100%		18		60%			
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli Fraksi	42	1.684.135.170,00	7	252.000.000	7	orang	255.140.000,00	7	42.000.000,00	7	63.000.000	7	63.000.000	7	84.000.000	7	252.000.000	100%	98,77%	14	504.000.000	33%	29,93%		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan kemitraan antara DPRD, Sekretariat DPRD dan Wartawan, serta fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat (demo)	150	5.601.531.436,21	17	348.327.200	25	laporan	118.734.900,00	2	15.670.000,00	3	24.310.000	5	14.040.000		42.307.200	10	96.327.200	40%	81,13%	27	444.654.400	18%	7,94%		
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah kegiatan penyusunan program kerja DPRD	222	2.564.597.433,15	22	285.764.000	37	kali	320.043.400,00	-	-	-	-	7	-	-	233.000.000	7	233.000.000	19%	72,80%	29	518.764.000	13%	20,23%		
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD	1290	73.920.579.619,15	330	18.997.388.655	215	kali	7.799.897.684,00	26	2.003.415.600,00	19	2.136.832.400	17	1.656.804.000	26	1.895.792.320,00	88	7.692.844.320	41%	98,63%	418	26.690.232.975	32%	36,11%		
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	804	61.903.712.262,00	224	16.664.745.040	134	kali	6.065.242.684,00	11	1.731.614.500,00	9	1.994.823.600	7	1.559.464.500	8	1.633.747.900	35	6.919.650.500	26%	114,09%	259	23.584.395.540	32%	38,10%		
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD	48	2.571.855.813,15	12	492.594.750	8	kali	284.927.200,00	7	184.470.000,00	-	55.795.000	0	-	0	6.875.000	7	247.140.000	88%	86,74%	19	739.734.750	40%	28,76%		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah DPRD	222	262.065.720,00	47	48.411.020	37	kali	51.210.000,00	4	5.005.000,00	5	4.515.000	5	3.150.000	9	5.291.020	23	17.961.020	62%	35,07%	70	66.372.040	32%	25,33%		
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	216	9.182.945.824,00	47	1.791.637.845	36	kali	1.398.517.800,00	4	82.326.100,00	5	81.698.800	5	94.189.500	9	249.878.400,00	23	508.092.800	64%	36,33%	70	2.299.730.645	32%	25,04%		
Rata - rata capaian kinerja (%)																				151,49	114,84				0,23	0,53		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program									83.163.256.100,00									79.175.372.395				240.647.615.062						

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021 s/d 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungja wab	Keterangan								
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		14= 6 +12		15= 14/5x100		16	17								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												128,04	107,44			0,18	0,60		
Predikat Kinerja																												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya :																																			

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	Keterangan	
1.	91% ≤ 100%	Nama Instansi	
2.	76% ≤ 90%	Nama Program	
3.	66% ≤ 75%	Capaian Kinerja Per Kegiatan	
4.	51% ≤ 65%	Total Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program	
5.	≤ 50%		

Gresik, 31 Januari 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804121992031011

SOP BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

1. SOP Pengumpulan Data Kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana				Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
		Sekretaris	Irban	Kasubag Program dan Keuangan	Staf			
1	Mengumpulkan data laporan kinerja triwulan kepada subbag/seksi, OPD dan instansi terkait	Mulai				Perjanjian Kinerja, Rencana aksi	15 Menit	Disposisi
2	Merekap laporan kinerja triwulan					Disposisi Perjanjian Kinerja, Kinerja Aksi	30 Menit	Lembar Disposisi
3	Mengolah data laporan kinerja triwulan					Disposisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Progres Bulanan	2 Menit	Draft Laporan Kinerja
4	Menyusun laporan kinerja triwulan					Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 Menit	Draft Laporan Kinerja
5	Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada pejabat terkait					Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 Menit	Draft Laporan Kinerja
6	Merekap 2 (dua) laporan triwulan untuk menyusun laporan					Catatan Pembagian Tugas	2 Hari	Disposisi

				Ya				
7	Menyusun laporan semester dan laporan tahunan			Ya		Data Laporan Kinerja Triwulan	120 Hari	Lembar Disposisi
8	Mensosialisasikan laporan semesteran			Tidak		Hasil Koreksi Laporan Kinerja Triwulan	60 Menit	Draft Laporan Kinerja
9	Menyusun 2 (dua) Laporan semesteran menjadi laporan kinerja tahunan			Ya		Laporan Kinerja Triwulan	15 Menit	Draft Laporan Kinerja

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

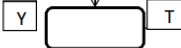
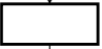
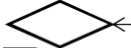
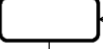


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 199203 1 011

2. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

No.	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Anggaran	PPTK	PPK-SKPD	Bendahara Pengeluaran	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPTK mengajukan surat pertanggungjawaban keuangan lengkap dengan bukti pendukung ke PPK-SKPD						SPJ beserta bukti pendukung	3 Menit	SPJ beserta bukti pendukung	
2	PPK SKPD memerintahkan staf yang di tunjuk untuk melakukan verifikasi SPJ keuangan						Disposisi	3 Menit	SPJ beserta bukti pendukung	
3	Staf melakukan verifikasi SPJ keuangan selanjutnya menyerahkan ke PPK-SKPD untuk divalidasi						SPD, DPA SKPD, standar biaya dan dasar hukum lainnya	5 menit	SPJ beserta bukti pendukung	
4	PPK SKPD memvalidasi SPJ dan menyerahkan ke PA untuk meminta persetujuan pembayaran						SPJ beserta bukti pendukung	3 menit	SPJ beserta bukti pendukung	
5	Persetujuan dan penandatanganan setuju bayar dan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran						SPJ beserta bukti pendukung	5 Menit	SPJ beserta bukti pendukung yang telah ditandatangani PA	
6	Pembayaran terhadap SPJ yang telah disetujui pembayarannya oleh PA						SPJ beserta bukti pendukung	5 Menit	SPJ beserta bukti pendukung yang telah ditandatangani PA	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

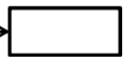
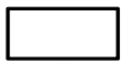
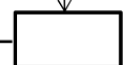
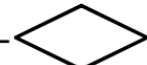
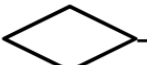


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 199203 1 011

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris DPRD	Kabag. Umum dan Keuangan	Kasubag. Program dan Keuangan	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag. Program dan Keuangan (PPK-SKPD) untuk membuat Laporan Keuangan akhir tahun					Disposisi	5 menit	Disposisi	
2	Menugaskan staf / Pembantu PPK untuk membuat Laporan Keuangan akhir tahun pada awal tahun berikutnya.					Disposisi	5 menit	Disposisi	
3	Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan laporan Keuangan dari bagian-bagian dan bendahara pengeluaran					Disposisi dan bahan-bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	20 jam	Konsep laporan keuangan akhir tahun	
4	Menyusun konsep LRA, Neraca dan CALK dan menyerahkan kepada Kasubag Program dan Keuangan / PPK-SKPD					Konsep laporan keuangan akhir tahun	1 minggu	Konsep laporan keuangan akhir tahun	
5	Mengoreksi konsep dan menyerahkan ke Kabag. Umum dan Keuangan					Konsep laporan keuangan akhir tahun	10 menit	Konsep laporan keuangan akhir tahun	
6	Mengoreksi konsep dan menyerahkan ke Sekretaris DPRD					Konsep laporan keuangan akhir tahun	10 Menit	Konsep laporan keuangan akhir tahun	
7	Menandatangani Laporan Keuangan akhir tahun					Konsep laporan keuangan akhir tahun	10 Menit	Laporan keuangan akhir tahun	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19680412 199203 1 011

4. Pengajuan SPP UP/GU/TU/LS

No.	Aktivitas	Mutu Baku							Keterangan
		PA	Kabag. Umum dan Keuangan	PPK-SKPD	Bendahara dan Pembantu Bendh. Pengeluaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat usulan SPP UP/GU/TU/LS per program dan kegiatan kepada PPK SKPD berdasarkan SPD.					SPD	1 jam	SPP UP/GU/TU/LS dengan lampirannya	
2	Meneliti kelengkapan dokumen SPP UP/GU/TU/LS dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD			Y T		SPD, DPA SKPD	15 Menit	dukumen SPP UP/GU/TU/LS	
3	Membuat rancangan SPM UP/GU/TU/LS jika dokumen SPP telah lengkap.					Dokumen SPP UP/GU/TU/LS	30 Menit	Rancangan SPM	
4	Meneliti Rancangan SPM UP/GU/TU/LS dan menyampaikan ke Pengguna Anggaran					Rancangan SPM UP/GU/TU/LS	10 menit	Rancangan SPM UP/GU/TU/LS	
5	Menandatangani SPM					Rancangan SPM UP/GU/TU/LS	10 Menit	SPM UP/GU/TU/LS	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 199203 1 011

5. Pencairan Dana Kegiatan pada Bendahara Keuangan

No.	Aktivitas							Keterangan
		Pengguna Anggaran	PPK dan Pembantu PPK	Bendahara dan Pembantu Bendh. Pengeluaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bendahara Pengeluaran menerima bukti-bukti pengeluaran/SPJ dari PPTK dan menyerahkan ke PPK untuk diverifikasi				Bukti Pengeluaran yang lengkap	5 menit	Bukti Pengeluaran yang lengkap	
2	Meneliti kelengkapan SPJ dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan				Bukti Pengeluaran yang lengkap	15 menit	Bukti Pengeluaran yang lengkap	
3	Menghitung pengenaan PPN/PPH atas belanja barang dan jasa.				Bukti Pengeluaran yang lengkap, DPA SKPD	10 menit	Kebenaran penghitungan pajak	
4	KPA menyetujui pembayaran dan Menandatangani kwitansi				Bukti Pengeluaran yang lengkap, DPA SKPD	10 Menit	Bukti Pengeluaran yang lengkap	
5	Menginput bukti pengeluaran ke rekening berkenaan pada Program SIPKD dan menguji pembebanan SPJ sesuai dengan Anggaran Kas.				Bukti Pengeluaran yang lengkap, DPA SKPD, Perangkat komputer	10 Menit	BKU	
6	Melakukan Pembayaran				Bukti Pengeluaran yang lengkap, DPA SKPD, Perangkat komputer	10 Menit	BKU	



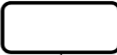
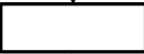
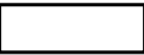
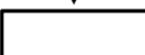
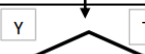
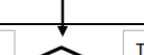
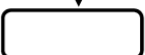
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 199203 1 011

6. Pembuatan RKA dan DPA

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris DPRD	Kabag. Umum dan Keuangan	Kasubag. Program dan Keuangan	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag. Program dan Keuangan untuk membuat RKA/RKA Perubahan					Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk membuat RKA/RKA Perubahan					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan, mengumpulkan bahan - bahan / data untuk membuat RKA/RKA Perubahan dari Bagian - Bagian serta menyerahkan ke Kasubag. Program dan Keuangan					Data dan konsep RKA/RKA Perubahan	60 menit	Konsep RKA/RKA Perubahan	
4	Memverifikasi dan mengoreksi konsep RKA/RKA Perubahan					Konsep RKA/RKA Perubahan	4 jam	Konsep RKA/RKA Perubahan	
5	Meng- input RKA/RKA Perubahan ke SIPKD					Konsep RKA/RKA Perubahan	36 jam	Konsep RKA/RKA Perubahan	
6	Mengoreksi hasil input RKA/RKA Perubahan dan menyerahkan ke Kabag. Umum dan Keuangan					Konsep RKA/RKA Perubahan	2 jam	Konsep RKA/RKA Perubahan hasil input	
7	Mengoreksi konsep dan menyerahkan ke Sekretaris DPRD					Konsep RKA/RKA Perubahan	10 Menit	Konsep RKA/RKA Perubahan hasil input	
8	Menandatangani RKA					Konsep RKA/RKA Perubahan	10 Menit	RKA/RKA Perubahan/DPA/DPA Perubahan	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

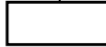
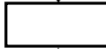
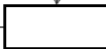
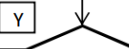
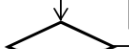
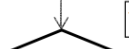
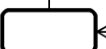


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 199203 1 011

7. Pembuatan Laporan Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran Realisasi SP2D Belanja Langsung SAU dan DAK

No.	Aktivitas	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris DPRD	Kabag. Umum dan Keuangan	Kasubag. Program dan Keuangan	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag. Program dan Keuangan Langsung untuk membuat laporan bulanan, triwulan dan semesteran					Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk mengumpulkan bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan semesteran					Disposisi	5 Menit	Disposisi	
3	Menghimpun, mengumpulkan kartu pengawasan dan SP2D sebagai bahan penyusunan laporan					Disposisi, SP2D dan kartu pengawasan	30 menit	konsep laporan	
4	Pengetikan, pencetakan laporan dan menyerahkan ke Kasubag. Program dan Keuangan					Disposisi, SP2D dan kartu pengawasan	120 menit	konsep laporan	
5	Koreksi konsep dan menyampaikan ke Kabag. Umum dan Keuangan					Konsep laporan	15 Menit	konsep laporan	
6	Koreksi konsep dan menyampaikan ke Sekretaris DPRD					Konsep laporan	15 Menit	konsep laporan	
7	Pertimbangan persetujuan					Konsep laporan	15 Menit	Konsep laporan	
8	Penandatanganan laporan					Konsep laporan	15 Menit	Laporan	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

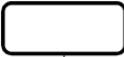
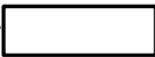
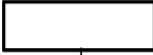
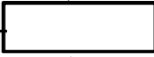
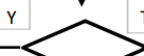
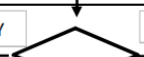


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 199203 1 011

8. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

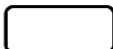
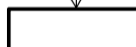
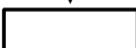
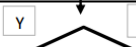
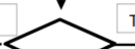
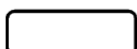
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris DPRD	Kabag. Umum dan Keuangan	Kasubag. Program dan Keuangan	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag. Umum dan Keuangan untuk membuat LKjIP					Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk membuat LKjIP					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan, mengumpulkan bahan - bahan / data untuk membuat LKjIP dari Bagian - bagian serta menyerahkan ke Kasubag. Program dan Keuangan					Data dan konsep LKjIP	2 jam	Data	
4	Memverifikasi dan mengoreksi data					Data dan konsep LKjIP	1 jam	Data	
5	Membuat LKjIP					Konsep LKjIP	8 jam	Konsep LKjIP	
6	Mengoreksi dan menyerahkan ke Kabag. Umum dan Keuangan					Konsep LKjIP	1 jam	Konsep LKjIP	
7	Mengoreksi konsep dan menyerahkan ke Sekretaris DPRD					Konsep LKjIP	15 Menit	Konsep LKjIP	
8	Menandatangani LKjIP					Konsep LKjIP	10 Menit	LKjIP	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19680412 199203 1 011

9. Pembuatan Prognosis dan Laporan Semesteran

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris DPRD	Kabag.Umum dan Keuangan	Kasubag. Fasilitas Penganggaran	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag. Fasilitas Penganggaran untuk membuat prognosis dan laporan semesteran					Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk membuat Laporan Prognosis dan Laporan Semesteran					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan, mengumpulkan bahan - bahan / data untuk membuat Laporan Prognosis dan Laporan Semesteran dari Bagian - Bagian serta menyerahkan ke Kasubag					Data dan konsep Laporan Prognosis dan Laporan Semester	2 jam	Data	
4	Memverifikasi dan mengoreksi data					Data dan konsep Laporan Prognosis dan Laporan Semester	2 jam	Data	
5	Membuat prognosis dan laporan semesteran berdasarkan data yang telah diperiksa atasan / kasubag					Konsep Prognosis dan Laporan Semesteran	6 jam	Konsep Prognosis dan Laporan Semesteran	
6	Mengoreksi dan menyerahkan ke Kabag					Konsep Prognosis dan Laporan Semesteran	1 jam	Konsep Prognosis dan Laporan Semesteran	
7	Mengoreksi konsep dan menyerahkan ke Sekretaris DPRD					Konsep Prognosis dan Laporan Semesteran	15 Menit	Konsep Prognosis dan Laporan Semesteran	
8	Menandatangani Prognosis dan Laporan Semesteran					Konsep Prognosis dan Laporan Semesteran	10 Menit	Prognosis dan Laporan Semesteran	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

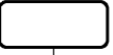
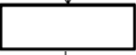
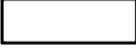
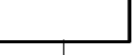
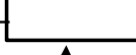
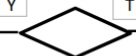
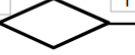
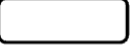


Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 199203 1 011

10. Pembuatan Renja SKPD

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris DPRD	Kabag. Umum dan Keuangan	Kasubag. Program dan keuangan	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag. Program dan Keuangan untuk membuat Renja SKPD					Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk membuat Renja SKPD					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan, mengumpulkan bahan - bahan / data untuk membuat Renja SKPD dari Bagian - Bagian serta menyerahkan ke Kasubag. Program dan Keuangan					Data dan konsep Renja	2 jam	Data	
4	Memverifikasi dan mengoreksi data					Data dan konsep Renja	1 jam	Data	
5	Membuat Renja SKPD					Konsep Renja	12 Jam	Konsep Renja	
6	Mengoreksi dan menyerahkan ke Kabag. Umum dan Keuangan					Konsep Renja	1 jam	Konsep Renja	
7	Mengoreksi konsep dan menyerahkan ke Sekretaris DPRD					Konsep Renja	15 Menit	Konsep Renja	
8	Menandatangani Renja SKPD					Konsep Renja	10 Menit	Renja SKPD	



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 199203 1 011

SOP BAGIAN UMUM

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK

11. Pengagendaan Surat Masuk

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pengadmini-strasi surat	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima dan mencatat surat dalam buku agenda surat masuk			surat	3 menit	tanda terima	
2	memeriksa kualifikasi surat. Jika bukan surat rahasia, membuka surat dan mempelajari isi surat, jika rahasia mempelajari identitas surat.			surat, lembar disposisi	5 menit	lembar disposisi	
3	mencatat dalam buku agenda surat dan melaporkan kepada Kasubag TU			surat, lembar disposisi	5 menit	bukti pengagendaan, lembar disposisi	SOP Pencatatan dalam buku agenda
4	memeriksa hasil pencatatan dan bukti surat. Jika memenuhi syarat memerintahkan Pengadimistrasi Surat untuk mendokumentasikan bukti pengagendaan surat, jika tidak memenuhi syarat mengembalikan kepada Pengagenda Surat untuk memperbaiki.			bukti pengagendaan, lembar disposisi, surat	3 menit	bukti pengagendaan, disposisi, surat	
5	mendokumentasikan bukti pengagendaan surat			bukti pengagendaan, disposisi, surat	3 menit	bukti pengagendaan	SOP pengagendaan berkas

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 199203 1 011

12. Pengagendaan Surat Keluar

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pengadmini-strasi surat	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima surat dan mencatat dalam buku agenda surat keluar			surat	3 menit	tanda terima	
2	memeriksa kualifikasi surat. Jika surat yang akan dikirim sudah betul maka ditulis identitas surat dalam buku agenda surat keluar tapi apabila masih salah akan dikembalikan untuk perbaikan			surat, lembar disposisi	5 menit	lembar disposisi	
3	mencatat dalam buku agenda surat keluar dan melaporkan kepada Kasubag TU untuk dicek kebenaran surat yang akan dikirim			surat, lembar disposisi	5 menit	bukti pengagendaan, lembar disposisi	SOP Pencatatan dalam buku agenda
4	memeriksa hasil pencatatan dan bukti surat. Jika memenuhi syarat memerintahkan Pengadimistrasi Surat untuk mendokumentasikan bukti pengagendaan surat keluar, jika tidak memenuhi syarat mengembalikan kepada Pengagenda Surat untuk memperbaiki.			bukti pengagendaan, lembar disposisi, surat keluar untu penanda tangan surat undangan rapat	3 menit	bukti pengagendaan, disposisi, penandatanganan surat keluar	
5	mendokumentasikan bukti pengagendaan surat keluar untuk pendistribusian ke yang bersangkutan			bukti pengagendaan surat keluar	3 menit	bukti pengagendaan surat keluar	SOP pembuatan surat undangan rapat

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Ir. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 199203 1 011